



LAPORAN KINERJA 2018



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp.(0334) 8780990 Fax.(0334) 887461 - 885534
e-Mail : kominfo@lumajangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya semata Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, keberhasilan maupun tidak keberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari Hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 di Tahun 2018.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/ kegiatan

Laporan Kinerja (LKj)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2018, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Lumajang, 28 Februari 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pemina Tk. I

NIP. 19710113 199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini disusun. LKj ini menyampaikan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selama tahun 2018 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKj juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKj Tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari keseluruhan bidang tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, tentunya tidak hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan namun juga dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.



**LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	
A. Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
B. Gambaran Umum dan Tupoksi	3
1. Kondisi Kepegawaian	4
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
1. Tujuan	9
2. Sasaran	9
3. Strategi dan Kebijakan	10
4. Program dan Kegiatan	10
5. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	11
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	13
B. Perjanjian Kinerja	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	18

Laporan Kinerja (LKj)

A.	Akuntabilitas Keuangan	25
B.	Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	44
I.	PENUTUP	47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Pakta Integritas
- Perjanjian Kinerja (PK)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Rencana Strategis (RENSTRA)
- Daftar Kepegawaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur,pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif

dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya *e-government* merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai *public relation* seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Kinerja (LKj) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2018 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2018, sehingga LKj ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terwujud

dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

3. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dibatasi pada Penyajian Kinerja yang terkait dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang pesandian yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 59 orang yang terdiri dari 20 orang PNS dan 39 orang Tenaga Honorer.

Berikut kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Tenaga Honorer		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	1	3	4	6,79
3	SMA/SMK	5	15	20	33,90
4	D3	4	2	6	10,17
5	S1	7	19	26	44,07
6	S2	3	0	3	5,08
Jumlah		20	39	59	100

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan informatika memiliki pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) yaitu 44,07% (26 orang). Sedangkan untuk jenjang SMA/ SMK sebanyak 33,90% (20 orang), SMP sebanyak 6,79% (4 orang) dan D3 memiliki proporsi yang sama yaitu 10,17% (6 orang). Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 berdasarkan Pangkat/ Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	3	15%
3	Golongan III	13	65 %
4	Golongan IV	4	20 %
Jumlah		20	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018

sebagian besar Golongan Ruang III yaitu sebanyak 65% (13 orang), Golongan II yaitu sebanyak 15% (3 orang) dan Golongan IV yaitu sebanyak 20% (4 orang) dan golongan I sebanyak 0 % (0 orang). Disamping pendidikan formal, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural

No	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	1
4	IV	4
Jumlah		5

Sedangkan jika dilihat berdasarkan eselon maka ditunjukkan oleh Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun 2018 Berdasarkan Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	IIb	1
2	IIIa	1
3	IIIb	3
4	IVa	11
Jumlah		16

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
01	01	GOLONGAN TANAH	0			
	01.01.	- Tanah	0	-	-	-
02	02	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	441			
	02.02.	- Alat-Alat Besar	2	2	-	-
	02.03.	- Alat-Alat Angkutan	16	15	1	-
	02.04.	- Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	1	-	-
	02.05.	- Alat-Alat Pertanian	0	-	-	-
	02.06.	- Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	537	537	-	-
	02.07.	- Alat-Alat Studio & Komunikasi	22	22	-	-
	02.08.	- Alat-Alat Kedokteran	0	-	-	-
	02.09.	- Alat-Alat Laboratorium	0	-	-	-
	02.10.	- Alat-Alat Persenjataan / Keamanan	0	-	-	-
03	03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	5	5	-	-
	03.11.	- Bangunan Gedung	5	5	-	-
	03.12.	- Monumen	0	-	-	-
04	04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	0	-	-	-
	04.13.	- Jalan Dan Jembatan	0	-	-	-
	04.14.	- Bangunan Air / Irigasi	0	-	-	-
	04.15.	- Instalasi	0	-	-	-
	04.16.	- Jaringan	0	-	-	-
05	05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	0			
	05.17.	- Buku Dan Perpustakaan	0	-	-	-
	05.18.	- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	-	-	-
	05.19.	- Hewan, Ternak Dan Tanaman	0	-	-	-
06	06	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	-	-	-

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang serta dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

a. Tugas

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Tujuan

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi”

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

a) Meningkatkan Saluran Komunikasi dan Informasi

Indikator sasaran “Meningkatnya Saluran Komunikasi dan Informasi” adalah peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dihitung dengan formula jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun.

Jumlah saluran komunikasi dan informasi merupakan penjumlahan dari jumlah media massa yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah media elektronik (radio), jumlah media cetak (buletin/majalah), jumlah Kelompok Informasi Masyarakat, Jumlah PPID (PPID Pembantu dan PPID Desa/Kelurahan), Jumlah Media Online (website dan media sosial) dan jumlah media luar ruang (baliho/spanduk/videotron).

b) Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK

Indikator sasaran “Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK” adalah peningkatan Peningkatan jumlah web aplikasi atau sub domain yang dihitung dengan formula jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun.

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
7. Program pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

4. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan/ pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

- e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
 - a. Pengelolaan Radio Suara Lumajang
 - b. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - c. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
 - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - a. Workshop SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - b. Pembinaan KIM
 - c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
 - a. Penyelenggaraan Persandian Daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Pengembangan Website
 - b. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik
 - c. Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
 - d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
 - e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - f. Bimbingan Teknis Aplikasi LPSE
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - a. Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Melalui Radio, PPID dan Kemitraan Dengan Media Massa
3. Meningkatkan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial

4. Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK
6. Mewujudkan ketersediaan data yang mutakhir

6. Rencana Kerja Tahunan

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.360.330.940
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Yang Dilaksanakan	1.360.330.940
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.070.597.060
	Pembangunan/ pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	677.051.060
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	393.546.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	23.832.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Laporan Lakip yang disusun	1.455.000
	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Prognosis yang disusun	904.000
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	904.000
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan IKM	684.000

	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumah Laporan RKA	19.885.000
4	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	1.673.422.000
	Pengelolaan Radio Suara Lumajang	Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Program Acara Radio Suara Lumajang	287.372.000
	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah Forum PPID yang dibina	261.450.000
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah Konten Informasi yang disebarluaskan	1.124.600.000
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui pengelolaan Komunikasi Publik	875.519.000
	Worshop SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta workshop yang aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga (citizen journalism)	54.380.000
	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang dibentuk	372.435.000
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah sebaran informasi melalui Banner/ Baliho/ Videotron/ Media Sosial/ Media cennter dan Anjungan Informasi	448.704.000
7	Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Penyebarluasan Informasi yang bersandi	183.040.000

	Penyelenggaraan Persandian Daerah	Jumlah Informasi yang bersandi	183.040.000
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK	835.123.000
	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola	106.340.000
	Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi	Jumlah pelayanan publik yang terintegrasi	220.560.000
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang	103.800.000
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	Jumlah Pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website	27.000.000
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Pengadaan melalui e-procurement	226.198.000
	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Jumlah Peserta Bimtek aplikasi SPSE	16.300.000
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah	84.620.000
	Pengolahan, Updating, dan Analisa Data Statistik Daerah	Jumlah Diseminasi Informasi data Statistik daerah kepada masyarakat	84.620.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah data OPD yang mutakhir	10.350.000

B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
3	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Publik melalui Radio, PPID dan Kemitraan dengan Media Massa	Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Media Massa	100%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui pengelolaan Media Publik dan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik	100%
7.	Meningkatnya Keamanan Informasi di Bidang Persandian	Persentase Informasi yang bersandi	100%
8.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan TIK	100%

Laporan Kinerja (LKj)

9.	Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi berbasis TIK	Persentase Penyebarluasan Informasi Melalui Pengelolaan data statistik daerah	100%
----	--	---	------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah **LKj**.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang 2018 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematis dan didasarkan pada *Kelompok Indikator Kegiatan* yang berupa indikator masukan (**Input**), Indikator Keluaran (**Output**), Indikator Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), dan Dampak (**Impact**). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tersebut dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar pencapaiannya.

Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO. URUT	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	≤ 55%	Kurang Berhasil
2.	56% s/d 70%	Cukup Berhasil
3.	71% s/d 85%	Berhasil
4.	≥ 86%	Sangat Berhasil

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 digambarkan dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disinggung pada Bab II di atas. Gambaran ketercapaian Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tahapan proses berikut :

MISI 3 :

“Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa, dan Bermasyarakat.”

TUJUAN 1 :

“Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan.”

Berdasarkan hasil rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Rumusan Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

“Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi”

Dari rumusan Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirumuskan pula indikator Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

“Penyebarluasan Informasi melalui media publik”

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dibutuhkan untuk memberikan Peningkatan dan Penyempurnaan/Perbaikan Pelayanan secara menyeluruh. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN : Meningkatkan keterbukaan komunikasi dan informasi

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatkan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi	Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	294	304	SANGAT BERHASIL
	Meningkatnya pelayanan	31	36	SANGAT

	komunikasi dan informasi berbasis TIK			BERHASIL
--	---------------------------------------	--	--	----------

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut di atas dapat dicapai oleh Indikator Kinerja, rumusan dari Indikator tersebut yaitu Terlaksananya fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo, Terlaksananya Pengembangan Website, Terlaksananya Pengelolaan Radio Suara Lumajang, dan Terlaksananya Forum PPID. Gambaran Realisasi Indikator Kinerja Strategis dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Penyebarluasan informasi melalui media publik	Peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi	294	304	103,40%
	Peningkatan jumlah web aplikasi/sub domain	31	36	116,12%

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-program yang dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dari Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran antara lain :

1) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017			PENYEBAB	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan	Peningkatan jumlah saluran komunikasi	294	304	TERCAPAI	Adanya regulasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

informasi	dan informasi				Keterbukaan Informasi Publik), pada Pasal 6 Ayat 3 berbunyi “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”.	
	Peningkatan jumlah web aplikasi /sub domain	31	36	TERCAPAI	Komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan terpercaya. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perlu dipertahankan dan ditingkatkan

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara keseluruhan indikator kinerja sasaran adalah “TERCAPAI”, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja Rata-rata mencapai 161,46%.

2) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PROGRAM	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)			% TINGKAT EFISIENSI	KET.
			PAGU PAK (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi Dan Informasi	Peningkatan Jumlah Saluran Komunikasi Dan Informasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.360.330.940	1.229.172.096	131.158.844	10	EFISIEN
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.070.597.060	942.983.107	127.613.953	12	EFISIEN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	23.832.000	20.973.800	2.858.200	12	EFISIEN
		Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	1.673.422.000	1.617.668.310	55.753.690	3	EFISIEN
		Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	875.519.000	816.441.242	59.077.758	7	EFISIEN
		Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	183.040.000	147.455.020	35.584.980	4	EFISIEN
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	435.750.000	421.830.000	13.920.000	14	EFISIEN
		Peningkatan Jumlah web aplikasi/ sub domain	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	835.123.000	805.093.492	30.029.508	19
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	94.970.000	82.110.000	12.860.000	3	EFISIEN

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi Dan Informasi secara keseluruhan dengan hasil "TERCAPAI".

3) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PROGRAM	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)			KET.
			PAGU PAK	REALISASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi Dan Informasi	Peningkatan Jumlah Saluran Komunikasi Dan Informasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.360.330.940	1.229.172.096	131.158.844	EFISIEN
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.070.597.060	942.983.107	127.613.953	EFISIEN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	23.832.000	20.973.800	2.858.200	EFISIEN
		Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	1.673.422.000	1.617.668.310	55.753.690	EFISIEN
		Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	875.519.000	816.441.242	59.077.758	EFISIEN
		Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	183.040.000	147.455.020	35.584.980	EFISIEN
		Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	435.750.000	421.830.000	13.920.000	EFISIEN
		Peningkatan Jumlah web aplikasi/ sub domain	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	835.123.000	805.093.492	30.029.508
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	94.970.000	82.110.000	12.860.000	EFISIEN

Dari tabel tersebut di atas bahwasanya Hasil Capaian Pengukuran Program yang menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Perjanjian Kinerja dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran secara keseluruhan dengan hasil “EFISIEN”.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Sekretariat, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI				
		ANGGARAN (Rp.)		REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	(%)
		SEBELUM PAK	SETELAH PAK			
	BELANJA	8.254.784.450,00	8.051.044.743,00	7.433.068.467,00	617.976.276,00	92,32
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.158.352.450,00	1.498.460.743,00	1.349.341.400,00	149.119.343,00	90,05
	BELANJA PEGAWAI	1.158.352.450,00	1.498.460.743,00	1.349.341.400,00	149.119.343,00	90,05
	Gaji dan Tunjangan	1.049.036.050,00	1.278.901.343,00	1.152.130.672,00	126.770.671,00	90,09
	Gaji pokok PNS / uang representasi	791.751.291,00	905.298.706,00	859.188.954,00	46.109.752,00	94,91
	Tunjangan keluarga	74.087.946,00	113.063.445,00	86.467.062,00	26.596.383,00	76,48
	Tunjangan jabatan	122.120.700,00	185.140.000,00	143.670.000,00	41.470.000,00	77,60
	Tunjangan fungsional umum	11.907.350,00	13.740.000,00	10.820.000,00	2.920.000,00	78,75
	Tunjangan beras	44.103.800,00	51.929.526,00	43.958.940,00	7.970.586,00	84,65
	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.372.495,00	1.601.964,00	1.185.481,00	416.483,00	74,00
	Pembulatan gaji	13.617,00	15.426,00	10.409,00	5.017,00	67,48
	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	3.678.851,00	8.112.276,00	6.829.826,00	1.282.450,00	84,19
	Tambahan Penghasilan PNS	109.316.400,00	219.559.400,00	197.210.728,00	22.348.672,00	89,82
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	0,00	116.945.000,00	116.901.878,00	43.122,00	99,96
	Tunjangan uang makan	109.316.400,00	102.614.400,00	80.308.850,00	22.305.550,00	78,26
	BELANJA LANGSUNG	7.096.432.000,00	6.552.584.000,00	6.083.727.067,00	468.856.933,00	92,84
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.352.645.940,00	1.360.330.940,00	1.229.172.096,00	131.158.844,00	90,36
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	1.352.645.940,00	1.360.330.940,00	1.229.172.096,00	131.158.844,00	90,36
	BELANJA PEGAWAI	120.150.000,00	120.150.000,00	116.300.000,00	3.850.000,00	96,80
	Honorarium PNS	87.222.000,00	91.912.000,00	91.112.000,00	800.000,00	99,13
	Honorarium pengadaan barang/jasa	17.100.000,00	29.842.000,00	29.492.000,00	350.000,00	98,83
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	61.122.000,00	53.070.000,00	53.070.000,00	0,00	100,00
	Honorarium pengurus barang	5.400.000,00	5.400.000,00	4.950.000,00	450.000,00	91,67

Laporan Kinerja (LKj)

Honorarium penerima hasil pekerjaan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
Uang lembur	32.928.000,00	28.238.000,00	25.188.000,00	3.050.000,00	89,20
Uang lembur PNS	32.928.000,00	28.238.000,00	25.188.000,00	3.050.000,00	89,20
BELANJA BARANG DAN JASA	1.232.495.940,00	1.240.180.940,00	1.112.872.096,00	127.308.844,00	89,73
Belanja Bahan Pakai habis	78.500.700,00	80.868.080,00	78.799.000,00	2.069.080,00	97,44
Belanja alat tulis kantor	55.263.900,00	55.264.280,00	54.997.800,00	266.480,00	99,52
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	14.261.300,00	14.261.300,00	14.261.300,00	0,00	100,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.055.500,00	6.422.500,00	4.619.900,00	1.802.600,00	71,93
Belanja Bahan / Material	4.200.000,00	4.200.000,00	4.197.000,00	3.000,00	99,93
Belanja bahan makanan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.197.000,00	3.000,00	99,93
Belanja Jasa Kantor	579.800.000,00	570.800.000,00	507.791.513,00	63.008.487,00	88,96
Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	13.110.706,00	4.889.294,00	72,84
Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00	1.436.200,00	963.800,00	59,84
Belanja listrik	192.000.000,00	183.000.000,00	147.682.159,00	35.317.841,00	80,70
Belanja kawat/faksimili/internet	367.400.000,00	367.400.000,00	345.562.448,00	21.837.552,00	94,06
Belanja Premi Asuransi	38.687.940,00	4.165.560,00	3.753.083,00	412.477,00	90,10
Belanja premi asuransi kesehatan	34.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	4.055.940,00	4.165.560,00	3.753.083,00	412.477,00	90,10
Belanja Cetak dan Penggandaan	29.882.300,00	36.882.300,00	25.480.750,00	11.401.550,00	69,09
Belanja cetak	20.815.900,00	20.815.900,00	13.184.500,00	7.631.400,00	63,34
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	9.066.400,00	16.066.400,00	12.296.250,00	3.770.150,00	76,53
Belanja Makanan dan Minuman	32.250.000,00	36.250.000,00	10.574.200,00	25.675.800,00	29,17
Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	34.000.000,00	8.500.000,00	25.500.000,00	25,00
Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	2.250.000,00	2.074.200,00	175.800,00	92,19
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	27.500.000,00	32.500.000,00	32.318.000,00	182.000,00	99,44
Belanja pakaian batik tradisional	13.750.000,00	16.250.000,00	16.087.500,00	162.500,00	99,00

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja pakaian olah raga	13.750.000,00	16.250.000,00	16.230.500,00	19.500,00	99,88
	Belanja Perjalanan Dinas	277.095.000,00	313.955.000,00	297.078.550,00	16.876.450,00	94,62
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.670.000,00	30.500.000,00	30.437.500,00	62.500,00	99,80
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.425.000,00	283.455.000,00	266.641.050,00	16.813.950,00	94,07
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	164.580.000,00	160.560.000,00	152.880.000,00	7.680.000,00	95,22
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	124.200.000,00	121.800.000,00	117.000.000,00	4.800.000,00	96,06
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	38.880.000,00	37.260.000,00	35.880.000,00	1.380.000,00	96,30
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.026.464.060,00	1.070.597.060,00	942.983.107,00	127.613.953,00	88,08
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	634.463.060,00	677.051.060,00	665.250.600,00	11.800.460,00	98,26
	BELANJA PEGAWAI	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Honorarium PNS	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.531.500,00	6.531.500,00	6.420.000,00	111.500,00	98,29
	Belanja Alat Kantor	1.606.800,00	1.606.800,00	1.500.000,00	106.800,00	93,35
	Belanja mesin hitung/jumlah	1.606.800,00	1.606.800,00	1.500.000,00	106.800,00	93,35
	Belanja Alat Rumah Tangga	4.924.700,00	4.924.700,00	4.920.000,00	4.700,00	99,90
	Belanja meubelair	4.924.700,00	4.924.700,00	4.920.000,00	4.700,00	99,90
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	625.731.560,00	670.519.560,00	658.830.600,00	11.688.960,00	98,26
	Belanja Modal Alat-Alat Bantu	3.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00	97,56
	Belanja modal pompa	3.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00	97,56
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	137.288.000,00	137.288.000,00	127.885.500,00	9.402.500,00	93,15
	Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua	137.288.000,00	137.288.000,00	127.885.500,00	9.402.500,00	93,15
	Belanja Modal Alat Ukur	7.050.000,00	7.050.000,00	7.000.000,00	50.000,00	99,29
	Belanja modal alat ukur universal	7.050.000,00	7.050.000,00	7.000.000,00	50.000,00	99,29

Laporan Kinerja (LKj)

Belanja Modal Alat Kantor	74.468.353,00	95.634.353,00	95.454.000,00	180.353,00	99,81
Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	26.981.196,00	26.981.196,00	26.884.000,00	97.196,00	99,64
Belanja modal office use	47.487.157,00	68.653.157,00	68.570.000,00	83.157,00	99,88
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	282.128.817,00	301.001.817,00	300.169.100,00	832.717,00	99,72
Belanja modal meubelair	18.718.700,00	20.718.700,00	20.652.500,00	66.200,00	99,68
Belanja modal alat pembersih	2.595.450,00	2.595.450,00	2.500.000,00	95.450,00	96,32
Belanja modal alat pendingin	30.008.000,00	37.508.000,00	37.482.500,00	25.500,00	99,93
Belanja modal home use	216.298.667,00	226.298.667,00	225.859.100,00	439.567,00	99,81
Belanja modal alat pemadam kebakaran	14.508.000,00	13.881.000,00	13.675.000,00	206.000,00	98,52
Belanja Modal Komputer	103.261.390,00	119.179.390,00	118.122.000,00	1.057.390,00	99,11
Belanja modal personal komputer	88.560.000,00	88.560.000,00	87.538.000,00	1.022.000,00	98,85
Belanja modal peralatan personal komputer	14.701.390,00	30.619.390,00	30.584.000,00	35.390,00	99,88
Belanja Modal Alat Komunikasi	18.485.000,00	8.316.000,00	8.200.000,00	116.000,00	98,61
Belanja modal alat komunikasi telephone	18.485.000,00	8.316.000,00	8.200.000,00	116.000,00	98,61
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	392.001.000,00	393.546.000,00	277.732.507,00	115.813.493,00	70,57
BELANJA BARANG DAN JASA	392.001.000,00	393.546.000,00	277.732.507,00	115.813.493,00	70,57
Belanja Bahan Pakai habis	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	104.404.000,00	111.766.000,00	76.220.054,00	35.545.946,00	68,20
Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	46.845.000,00	54.207.000,00	39.907.304,00	14.299.696,00	73,62
Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	46.459.000,00	46.459.000,00	31.893.750,00	14.565.250,00	68,65
Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	11.100.000,00	11.100.000,00	4.419.000,00	6.681.000,00	39,81
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.000.000,00	1.535.000,00	2.465.000,00	38,38
Belanja jasa konsultansi perencanaan	0,00	2.500.000,00	1.260.000,00	1.240.000,00	50,40

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja jasa konsultasi pengawasan	0,00	1.500.000,00	275.000,00	1.225.000,00	18,33
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	9.350.000,00	850.000,00	91,67
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	10.200.000,00	10.200.000,00	9.350.000,00	850.000,00	91,67
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	12.400.000,00	12.400.000,00	6.523.453,00	5.876.547,00	52,61
	Belanja pemeliharaan office use	12.400.000,00	12.400.000,00	6.523.453,00	5.876.547,00	52,61
	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	103.500.000,00	104.500.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	50,00
	Belanja pemeliharaan meubelair	0,00	10.000.000,00	9.650.000,00	350.000,00	96,50
	Belanja pemeliharaan alat pendingin	36.000.000,00	24.000.000,00	22.800.000,00	1.200.000,00	95,00
	Belanja pemeliharaan home use	67.500.000,00	70.500.000,00	19.800.000,00	50.700.000,00	28,09
	Belanja Pemeliharaan Komputer	48.330.000,00	54.480.000,00	36.530.000,00	17.950.000,00	67,05
	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	16.600.000,00	22.750.000,00	14.140.000,00	8.610.000,00	62,15
	Belanja pemeliharaan personal komputer	27.730.000,00	27.730.000,00	19.390.000,00	8.340.000,00	69,92
	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	75,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	85.400.000,00	84.524.000,00	876.000,00	98,97
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	100.000.000,00	85.400.000,00	84.524.000,00	876.000,00	98,97
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.832.000,00	23.832.000,00	20.973.800,00	2.858.200,00	88,01
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.455.000,00	1.455.000,00	1.130.000,00	325.000,00	77,66
	BELANJA PEGAWAI	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00
	Uang lembur	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00
	Uang lembur PNS	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	535.000,00	535.000,00	210.000,00	325.000,00	39,25

Laporan Kinerja (LKj)

Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	904.000,00	904.000,00	120.000,00	784.000,00	13,27
BELANJA PEGAWAI	628.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00
Uang lembur	628.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00
Uang lembur PNS	628.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00
BELANJA BARANG DAN JASA	276.000,00	276.000,00	120.000,00	156.000,00	43,48
Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	904.000,00	904.000,00	884.000,00	20.000,00	97,79
BELANJA PEGAWAI	628.000,00	628.000,00	608.000,00	20.000,00	96,82
Uang lembur	628.000,00	628.000,00	608.000,00	20.000,00	96,82
Uang lembur PNS	628.000,00	628.000,00	608.000,00	20.000,00	96,82
BELANJA BARANG DAN JASA	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	684.000,00	684.000,00	684.000,00	0,00	100,00
BELANJA PEGAWAI	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00
Uang lembur	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj)

	Uang lembur PNS	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	19.885.000,00	19.885.000,00	18.155.800,00	1.729.200,00	91,30
	BELANJA PEGAWAI	4.816.000,00	4.816.000,00	3.632.000,00	1.184.000,00	75,42
	Uang lembur	4.816.000,00	4.816.000,00	3.632.000,00	1.184.000,00	75,42
	Uang lembur PNS	4.816.000,00	4.816.000,00	3.632.000,00	1.184.000,00	75,42
	BELANJA BARANG DAN JASA	15.069.000,00	15.069.000,00	14.523.800,00	545.200,00	96,38
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.000,00	1.059.000,00	673.800,00	385.200,00	63,63
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	1.059.000,00	1.059.000,00	673.800,00	385.200,00	63,63
	Belanja Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	12.740.000,00	160.000,00	98,76
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.900.000,00	12.900.000,00	12.740.000,00	160.000,00	98,76
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	100,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA	2.058.822.000,00	1.673.422.000,00	1.617.668.310,00	55.753.690,00	96,67
	Pengelolaan Radio Suara Lumajang	645.622.000,00	287.372.000,00	273.803.095,00	13.568.905,00	95,28
	BELANJA PEGAWAI	16.536.000,00	16.536.000,00	16.528.000,00	8.000,00	99,95
	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	Uang lembur	11.736.000,00	11.736.000,00	11.728.000,00	8.000,00	99,93
	Uang lembur PNS	11.736.000,00	11.736.000,00	11.728.000,00	8.000,00	99,93
	BELANJA BARANG DAN JASA	206.680.000,00	223.430.000,00	210.673.595,00	12.756.405,00	94,29
	Belanja Bahan / Material	21.840.000,00	21.840.000,00	20.650.000,00	1.190.000,00	94,55

Laporan Kinerja (LKj)

Belanja bahan makanan	21.840.000,00	21.840.000,00	20.650.000,00	1.190.000,00	94,55
Belanja Jasa Kantor	0,00	15.200.000,00	6.922.595,00	8.277.405,00	45,54
Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	1.200.000,00	533.500,00	666.500,00	44,46
Belanja jasa perizinan penyelenggaraan penyiaran LPPL	0,00	14.000.000,00	6.389.095,00	7.610.905,00	45,64
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	141.840.000,00	143.390.000,00	140.245.000,00	3.145.000,00	97,81
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	126.000.000,00	127.550.000,00	125.350.000,00	2.200.000,00	98,28
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	15.840.000,00	15.840.000,00	14.895.000,00	945.000,00	94,03
Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi	43.000.000,00	43.000.000,00	42.856.000,00	144.000,00	99,67
Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	43.000.000,00	43.000.000,00	42.856.000,00	144.000,00	99,67
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	344.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal kendaraan bermotor khusus	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal office use	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Komputer	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal personal komputer	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Alat Studio	122.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal peralatan studio visual	122.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	78.156.000,00	47.406.000,00	46.601.500,00	804.500,00	98,30
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja modal bangunan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Bangunan Menara	58.156.000,00	47.406.000,00	46.601.500,00	804.500,00	98,30
Belanja modal bangunan menara telekomunikasi	58.156.000,00	47.406.000,00	46.601.500,00	804.500,00	98,30
Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	266.100.000,00	261.450.000,00	246.765.215,00	14.684.785,00	94,38

Laporan Kinerja (LKj)

(PPID)						
BELANJA PEGAWAI	144.300.000,00	144.300.000,00	139.650.000,00	4.650.000,00	96,78	
Honorarium PNS	144.300.000,00	144.300.000,00	139.650.000,00	4.650.000,00	96,78	
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.250.000,00	650.000,00	83,33	
Honorarium pejabat pengelola informasi daerah	140.400.000,00	140.400.000,00	136.400.000,00	4.000.000,00	97,15	
BELANJA BARANG DAN JASA	121.800.000,00	117.150.000,00	107.115.215,00	10.034.785,00	91,43	
Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	30.950.000,00	29.183.215,00	1.766.785,00	94,29	
Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	1.800.000,00	1.158.215,00	641.785,00	64,35	
Belanja dekorasi	650.000,00	1.300.000,00	975.000,00	325.000,00	75,00	
Belanja penggantian transport	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	15.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
Belanja jasa pendukung kegiatan	1.500.000,00	3.400.000,00	2.600.000,00	800.000,00	76,47	
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.600.000,00	9.600.000,00	8.582.000,00	1.018.000,00	89,40	
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	11.600.000,00	9.600.000,00	8.582.000,00	1.018.000,00	89,40	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman	54.600.000,00	44.100.000,00	40.950.000,00	3.150.000,00	92,86	
Belanja makanan dan minuman rapat	54.600.000,00	44.100.000,00	40.950.000,00	3.150.000,00	92,86	
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	28.800.000,00	26.500.000,00	22.400.000,00	4.100.000,00	84,53	
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	24.000.000,00	22.000.000,00	17.900.000,00	4.100.000,00	81,36	
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
Kerjasama Informasi dengan Media Massa	1.147.100.000,00	1.124.600.000,00	1.097.100.000,00	27.500.000,00	97,55	
BELANJA PEGAWAI	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	1.135.100.000,00	1.112.600.000,00	1.085.100.000,00	27.500.000,00	97,53	
Belanja Bahan / Material	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	1.135.100.000,00	1.082.750.000,00	1.055.850.000,00	26.900.000,00	97,52
	Belanja dekorasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	1.135.100.000,00	1.045.100.000,00	1.026.950.000,00	18.150.000,00	98,26
	Belanja penggantian transport	0,00	17.250.000,00	11.500.000,00	5.750.000,00	66,67
	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	0,00	17.550.000,00	14.550.000,00	3.000.000,00	82,91
	Belanja jasa pendukung kegiatan	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	0,00	7.500.000,00	6.900.000,00	600.000,00	92,00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	0,00	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	66,67
V	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	982.829.000,00	875.519.000,00	816.441.242,00	59.077.758,00	93,25
	Workshop SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	54.380.000,00	54.380.000,00	50.430.000,00	3.950.000,00	92,74
	BELANJA PEGAWAI	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00
	Uang lembur	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00
	Uang lembur PNS	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	100,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	53.588.000,00	53.588.000,00	49.638.000,00	3.950.000,00	92,63
	Belanja Bahan Pakai habis	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Belanja spanduk/baliho/banner	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bahan /	9.268.000,00	9.268.000,00	9.268.000,00	0,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj)

Material					
Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	9.268.000,00	9.268.000,00	9.268.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	29.600.000,00	26.850.000,00	2.750.000,00	90,71
Belanja kawat/faksimili/internet	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Belanja dekorasi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
Belanja penggantian transport	15.350.000,00	15.350.000,00	14.600.000,00	750.000,00	95,11
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00
Belanja jasa pendukung kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	100,00
Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	675.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Belanja sewa alat rumah tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	8.840.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	8.840.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
Pembinaan KIM	494.085.000,00	372.435.000,00	326.845.242,00	45.589.758,00	87,76
BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	66,67
Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	66,67
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	66,67
BELANJA BARANG DAN JASA	491.385.000,00	369.735.000,00	325.045.242,00	44.689.758,00	87,91
Belanja Jasa Kantor	426.600.000,00	312.480.000,00	267.940.242,00	44.539.758,00	85,75
Belanja kawat/faksimili/internet	138.000.000,00	103.950.000,00	78.810.242,00	25.139.758,00	75,82
Belanja dekorasi	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj)

Belanja penggantian transport	276.000.000,00	189.000.000,00	175.900.000,00	13.100.000,00	93,07
Belanja jasa pendukung kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	50,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	4.620.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Makanan dan Minuman	20.790.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman rapat	20.790.000,00	45.360.000,00	45.360.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.875.000,00	7.875.000,00	7.725.000,00	150.000,00	98,10
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.875.000,00	7.875.000,00	7.725.000,00	150.000,00	98,10
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	434.364.000,00	448.704.000,00	439.166.000,00	9.538.000,00	97,87
BELANJA PEGAWAI	32.348.000,00	32.348.000,00	29.130.000,00	3.218.000,00	90,05
Honorarium PNS	11.100.000,00	8.676.000,00	8.676.000,00	0,00	100,00
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	11.100.000,00	8.676.000,00	8.676.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium tim penyusun jurnal/buletin/majalah	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00
Uang lembur	14.448.000,00	16.872.000,00	13.654.000,00	3.218.000,00	80,93
Uang lembur PNS	14.448.000,00	16.872.000,00	13.654.000,00	3.218.000,00	80,93
BELANJA BARANG DAN JASA	402.016.000,00	416.356.000,00	410.036.000,00	6.320.000,00	98,48
Belanja Jasa Kantor	165.656.000,00	165.656.000,00	160.736.000,00	4.920.000,00	97,03
Belanja paket/pengiriman	9.656.000,00	9.656.000,00	4.828.000,00	4.828.000,00	50,00
Belanja dekorasi	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	136.200.000,00	136.200.000,00	136.108.000,00	92.000,00	99,93
Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	140.000.000,00	138.600.000,00	1.400.000,00	99,00
Belanja cetak	140.000.000,00	140.000.000,00	138.600.000,00	1.400.000,00	99,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00
Belanja sewa alat	7.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj)

	kantor					
	Belanja sewa alat studio	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	65.760.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	100,00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	45.600.000,00	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	20.160.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00
VI	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	880.019.000,00	835.123.000,00	805.093.492,00	30.029.508,00	96,40
	Pengembangan Website	139.005.000,00	134.925.000,00	133.935.000,00	990.000,00	99,27
	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
	Honorarium tim pengelola website	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	119.805.000,00	115.725.000,00	114.735.000,00	990.000,00	99,14
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	86.640.000,00	82.560.000,00	82.560.000,00	0,00	100,00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	78.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	8.640.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer	33.165.000,00	33.165.000,00	32.175.000,00	990.000,00	97,01
	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	33.165.000,00	33.165.000,00	32.175.000,00	990.000,00	97,01
	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	106.340.000,00	106.340.000,00	101.650.000,00	4.690.000,00	95,59
	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	8.100.000,00	8.090.000,00	10.000,00	99,88
	Honorarium PNS	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Uang lembur	0,00	8.100.000,00	8.090.000,00	10.000,00	99,88
	Uang lembur PNS	0,00	8.100.000,00	8.090.000,00	10.000,00	99,88
	BELANJA BARANG DAN JASA	48.240.000,00	48.240.000,00	43.620.000,00	4.620.000,00	90,42
	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	83,33

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	83,33
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	30.240.000,00	30.240.000,00	28.620.000,00	1.620.000,00	94,64
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	30.240.000,00	30.240.000,00	28.620.000,00	1.620.000,00	94,64
	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88
	Software komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	49.940.000,00	60.000,00	99,88
	Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi	220.560.000,00	220.560.000,00	218.097.000,00	2.463.000,00	98,88
	BELANJA BARANG DAN JASA	22.960.000,00	22.960.000,00	22.473.000,00	487.000,00	97,88
	Belanja Komputer	22.960.000,00	22.960.000,00	22.473.000,00	487.000,00	97,88
	Belanja peralatan jaringan	22.960.000,00	22.960.000,00	22.473.000,00	487.000,00	97,88
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	197.600.000,00	197.600.000,00	195.624.000,00	1.976.000,00	99,00
	Belanja Modal Komputer	197.600.000,00	197.600.000,00	195.624.000,00	1.976.000,00	99,00
	Belanja modal peralatan jaringan	197.600.000,00	197.600.000,00	195.624.000,00	1.976.000,00	99,00
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	103.800.000,00	103.800.000,00	102.620.000,00	1.180.000,00	98,86
	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	102.700.000,00	102.700.000,00	102.620.000,00	80.000,00	99,92
	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	99.920.000,00	80.000,00	99,92
	Belanja jasa konsultansi IT	50.000.000,00	50.000.000,00	49.995.000,00	5.000,00	99,99
	Belanja jasa konsultansi evaluasi	50.000.000,00	50.000.000,00	49.925.000,00	75.000,00	99,85
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	26.050.000,00	27.000.000,00	23.950.000,00	3.050.000,00	88,70
	BELANJA BARANG DAN JASA	26.050.000,00	27.000.000,00	23.950.000,00	3.050.000,00	88,70
	Belanja Jasa Kantor	13.050.000,00	14.000.000,00	10.950.000,00	3.050.000,00	78,21
	Belanja dekorasi	700.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	42,86
	Belanja penggantian	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00

Laporan Kinerja (LKj)

transport						
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	9.900.000,00	11.250.000,00	8.700.000,00	2.550.000,00	77,33	
Belanja jasa pendukung kegiatan	1.700.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	92,31	
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
Layanan Pengadaan Secara Elektronik	267.964.000,00	226.198.000,00	215.251.492,00	10.946.508,00	95,16	
BELANJA PEGAWAI	7.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
Honorarium PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
Uang lembur	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
Uang lembur PNS	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	100,00	
BELANJA BARANG DAN JASA	236.218.000,00	218.218.000,00	207.271.492,00	10.946.508,00	94,98	
Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	126.000.000,00	118.776.634,00	7.223.366,00	94,27	
Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
Belanja kawat/faksimili/internet	120.000.000,00	120.000.000,00	118.776.634,00	1.223.366,00	98,98	
Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
Belanja Perjalanan Dinas	34.798.000,00	34.798.000,00	34.734.858,00	63.142,00	99,82	
Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.798.000,00	34.798.000,00	34.734.858,00	63.142,00	99,82	
Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	54.720.000,00	54.720.000,00	51.060.000,00	3.660.000,00	93,31	
Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	43.200.000,00	43.200.000,00	40.500.000,00	2.700.000,00	93,75	

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	11.520.000,00	11.520.000,00	10.560.000,00	960.000,00	91,67
	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja pemeliharaan home use	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja pemeliharaan peralatan jaringan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja modal office use	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja modal home use	20.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja modal alat pemadam kebakaran	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	16.300.000,00	16.300.000,00	9.590.000,00	6.710.000,00	58,83
	BELANJA BARANG DAN JASA	16.300.000,00	16.300.000,00	9.590.000,00	6.710.000,00	58,83
	Belanja Bahan / Material	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	5.100.000,00	6.400.000,00	44,35
	Belanja penggantian transport	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	3.600.000,00	6.400.000,00	36,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	1.000.000,00	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00
	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	90,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	90,00
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/S TATISTIK DAERAH	94.970.000,00	94.970.000,00	82.110.000,00	12.860.000,00	86,46
	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data	84.620.000,00	84.620.000,00	75.220.000,00	9.400.000,00	88,89

Laporan Kinerja (LKj)

	Statistik Daerah					
	BELANJA PEGAWAI	55.200.000,00	55.200.000,00	46.000.000,00	9.200.000,00	83,33
	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	46.000.000,00	9.200.000,00	83,33
	Honorarium tim teknis kegiatan	55.200.000,00	55.200.000,00	46.000.000,00	9.200.000,00	83,33
	BELANJA BARANG DAN JASA	29.420.000,00	29.420.000,00	29.220.000,00	200.000,00	99,32
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00	94,29
	Belanja cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00	94,29
	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	100,00
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10.350.000,00	10.350.000,00	6.890.000,00	3.460.000,00	66,57
	BELANJA PEGAWAI	8.700.000,00	8.700.000,00	5.240.000,00	3.460.000,00	60,23
	Honorarium PNS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Uang lembur	7.200.000,00	8.700.000,00	5.240.000,00	3.460.000,00	60,23
	Uang lembur PNS	7.200.000,00	8.700.000,00	5.240.000,00	3.460.000,00	60,23
	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
VIII	PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	241.100.000,00	183.040.000,00	147.455.020,00	35.584.980,00	80,56
	Penyelenggaraan Persandian Daerah	241.100.000,00	183.040.000,00	147.455.020,00	35.584.980,00	80,56
	BELANJA PEGAWAI	39.600.000,00	3.380.000,00	2.100.000,00	1.280.000,00	62,13
	Honorarium PNS	39.600.000,00	3.380.000,00	2.100.000,00	1.280.000,00	62,13
	Honorarium tim teknis kegiatan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	3.600.000,00	3.380.000,00	2.100.000,00	1.280.000,00	62,13
	BELANJA BARANG DAN JASA	74.860.000,00	68.020.000,00	36.860.020,00	31.159.980,00	54,19

Laporan Kinerja (LKj)

	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	18.620.020,00	8.879.980,00	67,71
	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	9.814.573,00	8.185.427,00	54,53
	Belanja jasa gelombang radio/televiisi	9.500.000,00	9.500.000,00	8.805.447,00	694.553,00	92,69
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Belanja sewa tanah/lahan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja	27.360.000,00	20.520.000,00	18.240.000,00	2.280.000,00	88,89
	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	21.600.000,00	16.200.000,00	14.400.000,00	1.800.000,00	88,89
	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	5.760.000,00	4.320.000,00	3.840.000,00	480.000,00	88,89
	Belanja Pemeliharaan Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	40.000.000,00	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	99,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi	40.000.000,00	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	99,00
	Belanja modal alat komunikasi radio VHF	40.000.000,00	40.000.000,00	39.600.000,00	400.000,00	99,00
	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	86.640.000,00	71.640.000,00	68.895.000,00	2.745.000,00	96,17
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000,00	25.000.000,00	24.255.000,00	745.000,00	97,02
	Belanja modal bangunan gedung kantor	40.000.000,00	25.000.000,00	24.255.000,00	745.000,00	97,02
	Belanja Modal Bangunan Menara	46.640.000,00	46.640.000,00	44.640.000,00	2.000.000,00	95,71
	Belanja modal bangunan menara telekomunikasi	46.640.000,00	46.640.000,00	44.640.000,00	2.000.000,00	95,71
IX	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	435.750.000,00	435.750.000,00	421.830.000,00	13.920.000,00	96,81
	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	435.750.000,00	435.750.000,00	421.830.000,00	13.920.000,00	96,81
	BELANJA BARANG DAN JASA	435.750.000,00	435.750.000,00	421.830.000,00	13.920.000,00	96,81
	Belanja Bahan Pakai habis	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0

Laporan Kinerja (LKj)

Belanja spanduk/baliho/banner	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Bahan / Material	16.550.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	16.550.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	305.000.000,00	370.650.000,00	356.890.000,00	13.760.000,00	96,29
Belanja dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Belanja dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	250.000.000,00	307.650.000,00	296.290.000,00	11.360.000,00	96,31
Belanja penggantian transport	32.000.000,00	43.000.000,00	41.600.000,00	1.400.000,00	96,74
Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	21.000.000,00	19.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	94,74
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	4.000.000,00	3.840.000,00	160.000,00	96,00
Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyempulan	3.200.000,00	4.000.000,00	3.840.000,00	160.000,00	96,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	18.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
J U M L A H	8.254.784.450,00	8.051.044.743,00	7.433.068.467,00	617.976.276,00	92,32

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai Rp. 5.277.088.128,00 atau 92,26% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.719.532.290,00 ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil Penilaian Capaian Kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan Blank Spot pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
6. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Puskesmas.
3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Lumajang dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah dan website).
4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di OPD.
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 28 Februari 2019


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pemina Tk. I

NIP. 19710113 199101 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dony Fimbriyanto Yantri, S.Sos
NIP : 19710113 199101 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN, dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan serta pelayanan yang diberikan;
2. Dalam proses pengelolaan anggaran, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan dan profesional dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lumajang, 28 Februari 2019

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos
Pemina Tk. I
NIP. 19710113 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DONY FIMBRIYANTO YANTRI S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 8 Oktober 2018

PIHAK KEDUA



H. THORIQUL HAQ, M.ML

PIHAK PERTAMA



DONY FIMBRIYANTO YANTRI S.Sos

Pembina TK. I

NIP 19710113 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	Jumlah saluran komunikasi dan informasi	294
2.	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TKI	Jumlah WEB aplikasi / sub domain	30

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KETERANGAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.360.330.940,-	DAU
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.070.597.060,-	DAU
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.832.000,-	DAU
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.673.422.000,-	DAU
5	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	875.519.000,-	DAU
6	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	835.123.000,-	DAU
7	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	94.970.000,-	DAU
8	PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	183.040.000,-	DAU
9	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	435.750.000,-	DBHCHT
	JUMLAH	6.552.584.000.-	

Lumajang, 8 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DONY FIMBRIYANTO YANTRI S.Sos

Pembina TK. I

NIP-19710113 199101 1 001

LAPORAN RENJA (Rencana Kerja) TAHUN 2018



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMANJANG**

Jl. Alun-alun Utara no. 7 Telp. (0334) 8780990
LUMANJANG - 67316



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018. Penyusunan Program Kerja Tahun Anggaran 2018 ini sangat berguna sebagai dasar penentuan pelaksanaan kegiatan yang terukur, terencana, dan sejalan dengan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perubahan tahun 2015-2019. Rencana Kinerja dan Rencana Strategis perubahan disusun berdasarkan PP. No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Agar dalam pelaksanaan program dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, kami selalu berkoordinasi dalam setiap menentukan kebijakan baik internal maupun eksternal sekaligus sinkronisasi program dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan dalam penyusunan Program Kerja TA 2018 ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait, untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami menyadari bahwa penyusunan program kerja TA 2018 ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan dalam penyusunan.

Demikian penyusunan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang TA 2018 ini, dengan harapan bermanfaat untuk dipergunakan sebagai pedoman setiap langkah dan bertindak dalam melaksanakan program dan kegiatan guna pengambilan keputusan dan kebijakan, Terima Kasih.

Lumajang, 31 Juli 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19710113 199101 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD SKPD yang bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 10.Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.
- 11.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Komunikasi.
- 12.Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Renja - SKPD

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2017) Tri Wulan Ke II

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lumajang merupakan SKPD baru yang disahkan melalui Perda No. 72 tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Bagian Humas Sekretariat Daerah, Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2017 Bidang Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan Semester I sebagai berikut :

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Pengembangan Website memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%.
 - 2) Pengelolaan radio suara Lumajang, memiliki nilai realisasi anggaran 100%.
 - 3) Forum pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), memiliki nilai realisasi anggaran 33.3%.
 - 4) Fasilitasi penyempurna peraturan Perundang-undangan penyiaran dan KMIP, memiliki nilai realisasi anggaran 100%.
 - 5) Sosialisasi Perundang-undangan Dinas Komunikasi dan Informatika, memiliki nilai realisasi anggaran 33.3%.
2. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memiliki nilai realisasi anggaran 33.3%.
 - 2) Bimbingan Teknis pengelolaan Website, memiliki nilai realisasi anggaran 33.3%.
 - 3) Lomba Cerdik dan Komunikatif, memiliki nilai realisasi anggaran 100%.
 - 4) Pelatihan SDM dalam Bidang Komunika dan Informasi, memiliki nilai realisasi anggaran 0%.
3. Program kerjasama informasi dengan media massa, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Kejasama informasi dengan media massa, memiliki nilai realisasi anggaran 100%.

4. Program penyebarluasan informasi , terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain :
 - 1) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki nilai realisasi anggaran 26%.
5. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, memiliki kegiatan :
 - 1) Pengkajian dan pengembangan teknologi informasi
 - 2) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
6. Program Pengembangan data/ statistik daerah, memiliki kegiatan :
 - 1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, memiliki nilai realisasi 100%
 - 2) Pengolahan, updating, dan analisis data statistik, memiliki nilai realisasi 100%
7. Program pengamanan informasi Pemerintah Daerah, memiliki kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian daerah, memiliki nilai realisasi 100%

Adapun capaian program dan kegiatan akhir triwulan kedua tahun anggaran 2017 terlampir I .

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo kabupaten Lumajang Tahun 2017 ,ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan umum yaitu :

1.) Pengembangan Website

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Website adalah kegiatan yang meliputi pengembangan fitur-fitur layanan website resmi Pemkab.Lumajang serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi yang ditampilkan. Dengan Tujuan Meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat terhadap website lumajangkab.go.id.

Kegiatan Pengembangan Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyerap dan menyebarkan informasi yang diterima melalui website resmi Pemkab. Lumajang. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Website dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang. Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Struktural sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan peserta kegiatan Tim Teknis TIK Dinas Komunikasi dan Informatika dan Penyedia barang/jasa. Cara Pelaksanaan Kegiatan : Menyusun dan

menetapkan SK Tim Pengelola Website, Menyusun dan menetapkan SK tenaga teknis TIK dan Belanja Pemeliharaan infrastruktur berupa lisensi.

2.) Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Program pengelolaan informasi dan media massa adalah suatu program untuk mengupayakan sebuah layanan informasi ditujukan untuk masyarakat lumajang. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

3.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kegiatan Sosialisasi/ Pembinaan PPID ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, dengan mengundang nara sumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

4.) Kelompok Informasi Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang Komunikasi Publik dan Persandian, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik telah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Sebagai agen informasi yang bisa membantu menyebarkan berita-berita dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, KIM perlu diberi pembinaan, arahan, peningkatan kapasitas, serta sosialisasi program-program pemerintah Kabupaten Lumajang agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya KIM dapat bekerja dengan baik dan terarah.

Kemampuan KIM meningkat dan berkembang di berbagai aspek penyebaran informasi seperti bagaimana membuat blog yang baik, bagaimana menulis dan mengunggah informasi yang baik. Selain itu Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi KIM sebagai mitra Pemerintah dalam penerimaan, pengolahan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. KIM diharapkan lebih terbekali dan lebih terarah dalam membantu pemerintah untuk penyebaran informasi. Selain itu KIM juga akan memperoleh tambahan wawasan serta pengetahuan baru tentang informasi pemerintahan.

5.) Pengelolaan Media Publik

Pemerintah dituntut untuk kreatif dan memperbanyak informasi hasil-hasil pembangunan melalui media luar ruang

(benner/baliho/vidiotron/anjungan informasi), media sosial/media center, majalah, dan sebar serap informasi.

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah kombinasi antara swakelola dan kerjasama dengan pihak ketiga.

6.) Penyelenggaraan persandian daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang Komunikasi dan Persandian. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian yang bisa membantu mengamankan berita – berita, radio gram dan informasi dari Pemerintahan yang perlu pengamanan sesuai derajat dan klasifikasinya. Serta didukung dengan peralatan atau materiel /alat penunjang atau pendukung dalam melaksanakan pengamanan informasi dan persandian dalam Pemerintahan.

Pengawasan Menara telekomunikasi (Tower) dalam rangka memperlancar arus komunikasi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain :

1. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lumajng yang tidak terjangkau sinyal komunikasi
2. Masih adanya kesenjangan dalam akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan
3. Belum optimalnya kelembagaan dan peran PPID Kabupaten beserta PPID pembantu
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang terintegrasi sampai dengan tingkat desa
5. Sistem informasi manajemen berbasis elektronik masih dijalankan per sektor belum terintegrasi dengan sektor lain
6. Kurangnya SDM yang bisa menggunakan sarana dan prasaranaTIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang ada
7. Belum optimalnya kelembagaan dan peran kelompok informasi masyarakat (KIM) yang telah terbentuk
8. Keterbatasan sarpras pendukung di LPPL Radio Suara Lumajang
9. Perlu regulasi pelaksanaan terkait kelembagaan LPPL.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Adapun hasil review terhadap RKPD 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 1.352.645.940,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 1.360.330.940,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 1.026.464.060,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 1.070.597.060,00

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 6.984.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 23.832.000,00

4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 2.058.822.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 1.673.422.000,00

5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 982.829.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 875.519.000,00

6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 880.019.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 835.123.000,00

7. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 94.970.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD tidak berbeda dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar Rp. 94.970.000,00

8. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 241.100.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD jauh berbeda dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 183.040.000,00

9. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan pembangunan adalah sebesar Rp. 435.750.000,00

Hasil Review dari rancangan kebutuhan SKPD tidak berbeda dengan RKPD yaitu sebesar Rp. 435.750.000,00

Adapun Tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Terlampir II.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Lumajang Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan usulan program dan kegiatan dari Kecamatan Gucialit yaitu Pengadaan alat studio dan komunikasi (pengadaan tower), dan dari Kecamatan Klakah yaitu Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan

pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

A. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi”

B. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

a) Meningkatkan Saluran Komunikasi dan Informasi

Indikator sasaran “Meningkatnya Saluran Komunikasi dan Informasi” adalah peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dihitung dengan formula jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun.

Jumlah saluran komunikasi dan informasi merupakan penjumlahan dari jumlah media massa yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah media elektronik (radio), jumlah media cetak (buletin/majalah), jumlah Kelompok Informasi Masyarakat, Jumlah PPID (PPID Pembantu dan PPID Desa/Kelurahan), Jumlah Media Online (website dan media sosial) dan jumlah media luar ruang (baliho/spanduk/videotron).

b) Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK

Indikator sasaran “Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK” adalah peningkatan Peningkatan jumlah web aplikasi atau sub domain yang dihitung dengan formula jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun.

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
- a. Pengelolaan Radio Suara Lumajang
 - b. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - c. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
5. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
- a. Workshop SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - b. Pembinaan KIM
 - c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- a. Pengembangan Website
 - b. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik
 - c. Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
 - d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
 - e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - f. Bimbingan Teknis Aplikasi LPSE
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- a. Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
8. Program Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- a. Penyelenggaraan Persandian Daerah
9. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
- a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Adapun Tabel RENJA 2018 Terlampir III.

BAB VI

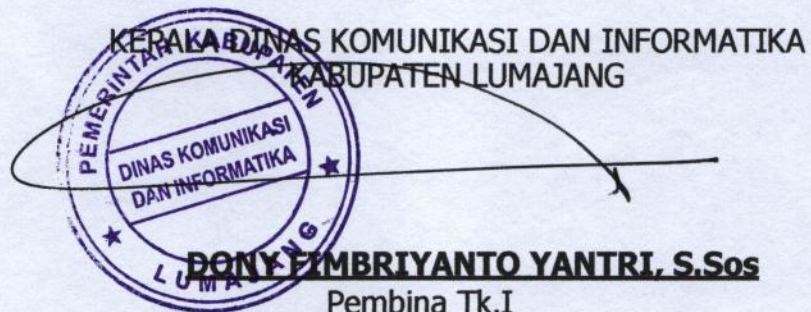
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi yang diharapkan.

Lumajang, 31 Juli 2017



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19710113 199101 1 001

LAMPIRAN I

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2017

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2017) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		22 Prioritas Nasional (Program)	Ket
					I		II		III		IV							
1	3	4	7		8		9	10		11		12 =	13 = 12 / 7 x 100		16	17		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
A	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Persentase jumlah diseminasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi informasi kepada masyarakat		469.700.000		31.384.000		202.619.000					234.003.000		50		Reformasi Birokrasi	
	Pengembangan Website	terselenggaranya pengembangan website	1 website	120.720.000	1 website	12.480.000	1 website	24.680.000					1 website	37.160.000	100%	31		
	Pengelolaan Radio Suara Lumajang	terselenggaranya operasional Radio Suara Lumajang	1 Radio Suara Lumajang	208.726.000	1 Radio Suara Lumajang	18.904.000	1 Radio Suara Lumajang	100.000.000					1 Radio Suara Lumajang	118.904.000	100%	57		
	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terbentuknya kelembagaan PPID OPD di Kabupaten Lumajang	3 kegiatan	53.004.000	-	-	1 kegiatan	16.535.000					1 kegiatan	16.535.000	33,3	31		
	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP	Terselenggaranya Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan penyiaran dan KMIP	1 Naskah akademik Raperda RSL	52.000.000	-	-	1 Naskah akademik Raperda RSL	49.654.000					1 Naskah akademik Raperda RSL	49.654.000	100%	95		
	Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo	terselenggaranya sosialisasi peraturan keterbukaan informasi publik	300 peserta	35.250.000	-	-	100 peserta	11.750.000					100 peserta	11.750.000	33,3	33		
2	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Persentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dalam diseminasi informasi melalui berbagai saluran komunikasi informasi kepada masyarakat		222.614.000		3.480.000		55.650.000					59.130.000		27			
	Pembinaan KIM	Terselenggaranya kegiatan pembinaan KIM	23 KIM , 3 kali kegiatan	125.160.000	-	-	1 kali kegiatan	41.720.000					1 kali kegiatan	41.720.000	33,3	33		
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	Terselenggaranya ibmbingan Teknis Pengelolaan Website	160 orang, 3 kali kegiatan	42.780.000	-	3.480.000	1 kali kegiatan	13.930.000					1 kali kegiatan	17.410.000	33,3	41		

	Lomba Cerdik Cermat dan Komunikatif	Terselenggaranya lomba cerdas cermat dan komunikatif	2 jenis lomba dan 23 KIM	54.674.000	-	-	-	-	-	2 jenis lomba dan 23 KIM	-	-	-	-		
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terselenggaranya pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	0 KIM	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
3	PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Persentase peningkatan asupan Informasi pembangunan Kab. Lumajang pada masyarakat		1.431.000.000		82.300.000		297.360.000				379.660.000		27	Reformasi Birokrasi	
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Terselenggaranya kerjasama publikasi dengan media massa	11 media harian, 28 media mingguan, 3 media elektronik, dan 6 media online	1.431.000.000		82.300.000		297.360.000				379.660.000	100%	27		
	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase peningkatan sebaran informasi melalui benner/balho/videtron/ media sosial/dan anjungan informasi		358.820.000		24.070.000		67.847.000				91.917.000		26	Reformasi Birokrasi	
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya diseminasi informasi melalui media luar ruang dan majalah	2 jenis publikasi melalui spanduk dan majalah	358.820.000	30	24.070.000		67.847.000				91.917.000		26		
4	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase tingkat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		73.612.000		-		-				-		-	Reformasi Birokrasi	
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Tersusunnya masterplan Teknologi Informasi	1 dokumen masterplan TI	49.912.000	-	-		-				-	-	-		
	Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Tersusunnya sistem informasi terhadap layanan publik	2 jenis layanan publik PPID dan sms center	23.700.000	-	-		-				-	-	-		
B	STATISTIK															
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Meningkatnya diseminasi informasi data statistik daerah yang mutakhir kepada masyarakat		106.380.000				14.015.000				120.395.000		113	Reformasi Birokrasi	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	65 titik monitoring	25.200.000		880.000		1.755.000				2.635.000	100%	10		

	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah	Terselenggaranya pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah	10 orang tim diseminasi informasi statistik	81.180.000	10 orang tim diseminasi	3.420.000	10 orang tim diseminasi	12.260.000				10 orang tim diseminasi	15.680.000	100%	19	
C	PERSANDIAN															
1	PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya pengamanan informasi pemerintah daerah		152.420.000		3.645.905		3.836.234					7.482.139		5	Reformasi Birokrasi
	Penyelenggaraan Persandian Daerah	Terselenggaranya persandian daerah	4 peralatan persandian daerah	152.420.000	-	3.645.905	-	3.836.234				-	7.482.139	-	5	
													Rata-rata capaian kinerja (%)			
													Predikat kinerja			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya sumberdaya antara lain SDM, sarana dan prasarana, tersedianya anggaran, adanya perencanaan, dan adanya kelompok informasi																
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kurangnya tenaga profesional, prasarana dan sarana belum memadai, anggaran belum mencukupi, dan belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):																

KETERANGAN :

K : Indikator kinerja (usahakan dalam bentuk kuantitatif, apabila tidak bisa dikuantitatifkan, boleh kualitatif). Lihat ouput dalam DPA kegiatan SKPD Saudara

Rp : Nilai Rupiah Anggaran/ Realisasi

Apabila Program/ kegiatan tersebut belum dilaksanakan/terrealisasi kolom diisi angka "0"



LAMPIRAN II

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2018
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	RENCANA AWAL RKPD					NO	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					catatan penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	pagu indikatif		Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Tarjet capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	60%	1.352.645.940,00	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	60%	1.352.645.940,00	
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kantor Dinas Kominfo	jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 bln			Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Kantor Dinas Kominfo	jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang dilaksanakan	12 bln		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	70%	1.026.464.060,00	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	70%	1.026.464.060,00	
	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	34 unit			Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	33 unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	76 unit			Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	76 unit		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	60%	23.832.000,00	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	60%	23.832.000,00	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah laporan sapik yang disusun	13 dok			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Kantor Dinas Kominfo	Jumlah laporan sapik yang disusun	13 dok		
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	6 dok			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	6 dok		
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 dok			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 dok		
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		Jumlah laporan IKM	3 dok			Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat		Jumlah laporan IKM	3 dok		
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah laporan RKA yang disusun	30 bendel			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		Jumlah laporan RKA yang disusun	30 bendel		
4	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa		Prosentase informasi publik yg di sebarluaskan melalui : Radio, PPID, Media Massa	75%	2.058.822.000,00	4	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa		Prosentase informasi publik yg di sebarluaskan melalui : Radio, PPID, Media Massa	75%	2.058.822.000,00	
	Pengelolaan Radio suara Lumajang		Jumlah forum PPID yang dibina	700 Partisipan per tahun			Pengelolaan Radio suara Lumajang		Jumlah forum PPID yang dibina	700 Partisipan per tahun		
	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	98 PPID Pembantu			Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Jumlah konten informasi yang disebarluaskan	98 PPID Pembantu		
	Kerjasama informasi dengan media massa		Jumlah konten informasi yang tersedia	400 konten			Kerjasama informasi dengan media massa		Jumlah konten informasi yang tersedia	400 konten		
5	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase penyebaran informasi ketentuan di bidang cukai	70%	435.470.000,00	5	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Persentase penyebaran informasi ketentuan di bidang cukai	70%	435.470.000,00	

	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan		jumlah sebaran Informasi melalui banner/baliho/videotron/Media Massa/Sosialisasi	4 jenis			Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan		jumlah sebaran Informasi melalui banner/baliho/videotron/Media Massa/Sosialisasi	4 jenis		
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik		Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Komunikasi Publik melalui : Workshop SDM dalam Komunikasi Publik, KIM yang terbentuk, Penyebarluasan Informasi melalui Banner/Baliho/Videotron /Media Center dan Anjungan Informasi, Informasi yang bersandi.	80%	982.829.000,00	6	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik		Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Komunikasi Publik melalui : Workshop SDM dalam Komunikasi Publik, KIM yang terbentuk, Penyebarluasan Informasi melalui Banner/Baliho/Videotron/Media Center dan Anjungan	80%	982.829.000,00	
	Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi		Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh workshop jurnalistik	21 KIM			Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi		Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh	21 KIM		
	Pembinaan KIM		Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh workshop jurnalistik				Pembinaan KIM		Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh workshop jurnalistik			
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Presentase meningkatnya jumlah informasi melalui media luar ruangan, media centre, mesia social dan mesia cetak.	140			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Presentase meningkatnya jumlah informasi melalui media luar ruangan, media centre, mesia social dan mesia cetak.	140		

7	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah		Prosentase penyebarluasan informasi yang bersandi	40%	241.100.000,00	7	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah		Prosentase penyebarluasan informasi yang bersandi	40%	241.100.000,00
	Penyelenggaraan Persandian Daerah		jumlah informasi yang bersandi	50 Informasi			Penyelenggaraan Persandian Daerah		jumlah informasi yang bersandi	50 Informasi	
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Prosentase web aplikasi/ sub domain yang dikelola	75%	880.019.000,00	8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Prosentase web aplikasi/ sub domain yang dikelola	75%	880.019.000,00
	Pengembangan Website		Jumlah kunjungan terhadap website	2000 kunjungan/ bulan			Pengembangan Website		Jumlah kunjungan terhadap website	2000 kunjungan/ bulan	
	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik		Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dibuat.	31 aplikasi			Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik		Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dibuat.	31 aplikasi	
	Pembangunan jaringan teknologi informasi		Jumlah aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan website resmi pemkab lumajang	3 layanan			Pembangunan jaringan teknologi informasi		Jumlah aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan website resmi pemkab lumajang	3 layanan	
	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi		Jumlah dokumen pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang	2 Dokumen			Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi		Jumlah dokumen pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website		Jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website	80 orang			Bimbingan Teknis Pengelolaan Website		Jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website	80 orang	
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	350 Paket			Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	350 Paket	
	Bimbingan Teknis Aplikasi LPSE		Jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE	40 Orang			Bimbingan Teknis Aplikasi LPSE		Jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE	40 Orang	

9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola	60%	94.970.000,00	9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola	60%	94.970.000,00
	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah		Jumlah informasi data statistik daerah kepada masyarakat	10 informasi			Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah		Jumlah informasi data statistik daerah kepada masyarakat	10 informasi	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah data OPD yang mutakhir	72 OPD			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah data OPD yang mutakhir	72 OPD	



 KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN LUMAJANG
DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos
 NIP. 19710113 199101 1 001

**BLANKO ISIAN RENCANA KERJA
TAHUN 2018**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	Peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi	294 media	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	Prosentase informasi publik yg di sebarluaskan melalui : Radio, PPID, Media Massa	700 partisipan di Radio, 98 PPID, 400 Konten	Pengelolaan Radio suara Lumajang	Jumlah partisipasi masyarakat dalam program acara Radio Suara Lumajang.	700 Partisipan per tahun	645.622.000
						Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah PPID pembantu yang dibentuk dan aktif	98 PPID Pembantu	266.100.000
						Kerjasama informasi dengan media massa	Jumlah konten berita yang disebarluaskan melalui media massa.	400 konten	1.147.100.000
			Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Prosentase informasi publik yg di sebarluaskan melalui : Radio, PPID, Media Massa	4 Jenis Publikasi (Bener, media massa, videotron, sosialisasi)	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta sosialisasi, jumlah sebaran informasi melalui : banner, spanduk, baliho, dan jumlah sebaran informasi melalui media massa	80 peserta sosialisasi, 37 benner, 35 spanduk, 3 baliho, dan media.	435.750.000

Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Komunikai Publik melalui : Workshop SDM dalam Komunikasi Publik, KIM yang terbentuk, Penyebarluasan Informasi melalui Banner/Baliho/Videotron/ Media Center dan Anjungan Informasi, Informasi yang bersandi.	200 Orang yang mengikuti workshop, 98 KIM yg terbentuk, 6 Jenis Publikasi melalui Banner/Baliho /Videotron/Media Center dan Anjungan Informasi, 50 Informasi.	Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh workshop jurnalistik	KIM dan Warga dinas komunikai dan informatika	54.380.000
			Pembinaan KIM	Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan warga dinas komunikasi dan informatika yang memperoleh workshop jurnalistik	KIM dan Warga dinas komunikai dan informatika	494.085.000
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase meningkatnya jumlah informasi melalui media luar ruangan, media centre, mesia social dan mesia cetak.	80%	434.364.000

			Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Komunikai Publik melalui : Workshop SDM dalam Komunikasi Publik, KIM yang terbentuk, Penyebarluasan Informasi melalui Banner/Baliho/Videotron/ Media Center dan Anjungan Informasi, Informasi yang bersandi.	200 Orang yang mengikuti workshop, 98 KIM yg terbentuk, 6 Jenis Publikasi melalui Banner/Baliho /Videotron/Media Center dan Anjungan Informasi, 50 Informasi.	Penyelenggaraan persandian daerah	Jumlah informasi terklarifikasi yang disandikan	50 informasi	241.100.000
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK	Peningkatan jumlah web aplikasi subdomain	30 web	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola	14 Sub domain dalam 1 tahun	Pengembangan Website	Jumlah kunjungan terhadap website	2000 kunjungan/ bulan	139.005.000
						Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dibuat.	31 aplikasi	106.340.000
						Pembangunan jaringan teknologi informasi	Jumlah aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan website resmi pemkab lumajang	3 layanan	220.560.000
						Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	Jumlah dokumen pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang	2 Dokumen	103.800.000

				Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	Jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website	80 orang	26.050.000	
				Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	350 Paket	267.964.000	
				Bimbingan Teknis Aplikasi LPSE	Jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE	40 Orang	16.300.000	
		Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Jumlah web aplikasi/ sub domain yang dikelola	14 Sub domain dalam 1 tahun	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah	Jumlah informasi data statistik daerah kepada masyarakat	10 informasi	84.620.000
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data OPD yang mutakhir	72 OPD	10.350.000	



 KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN LUMAJANG
DONY FIMBRIYANTO YANTRI S.Sos
 NIP. 19710113 199101 1 001

**RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2015 - 2019**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
JL. ALUN-ALUN UTARA NO.7 TELP. 0334-8780990**



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188/680/427.53/2018

T E N T A N G

REVIEW RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 - 2019

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terbentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu disusun rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tentang Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015- 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-638 Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RENSTRA Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Pasal 2

Rencana Strategis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 26 Maret 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG


DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19710113 199101 1 001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS 2019-2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Sekretaris	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Anggota	Kepala Bidang Informasi Publik
		Kepala Bidang Komunikasi Publik
		Kepala Bidang Aplikasi Informatika
		Ka. Subbag Keuangan
5	Tim Teknis	Pengadministrasi Perencanaan Program
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Lumajang
Pada Tanggal, 26 Maret 2018.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG**



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19710113 199101 1 001

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yang telah diperdakan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD di Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan tujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada RPJM Kabupaten Lumajang .

1.2 Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ;
10. Peraturan Daerah Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Renstra (Perencanaan Strategis) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ini adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
- b. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015– 2019 ;
- c. Merupakan rencana antisipatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan laju pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lumajang .

Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sesuai dengan Renstra Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

“Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan”

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana, Program dan Kegiatan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matrik Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
- Lampiran 2. Matrik Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015 – 2019
- Lampiran 3. Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program

B A B II

GAMBARAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika .

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.1 TUGAS

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

1.2 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian, Penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian, Penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelola sumber daya informatika, penata kelolaan aplikasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.3 SUSUNAN ORGANISASI

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika.

2. Sekretaris Dinas

Tugas Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan program kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pelaksanaan penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai.
- f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. Pemberian sarana dan pertimbangan kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Pemungutan retribusi pengawasan menara telekomunikasi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Bidang Informasi Publik

Tugas Kepala Bidang Informasi Publik :

Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Informasi Publik.

Fungsi Bidang Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah,

- pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan informasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi dan layanan hubungan media massa;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media massa;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik dan hubungan media massa;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Aplikasi Informatika.

Fungsi Kepala Bidang Aplikasi Informatika :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika , pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik ;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan pengembangan informatika,

- pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik ;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan informatika, pemberdayaan informatika dan penyelenggaraan layanan data dan statistik;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Komunikasi Publik dan Persandian

Tugas Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian :

Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang statistik Sektoral.

Fungsi Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi dan persandian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyedia akses informasi dan persandian;
- f. Pengawasan menara telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. UPT LPSE

UPT LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi UPT LPSE :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

1.4 RINCIAN TUPOKSI BIDANG

1. Sekretariat

Dalam menjalankan tupoksinya, Sekretaris dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
- i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
- j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

- e. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;
- g. Melakukan urusan gaji pegawai;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran), neraca dan lain-lain;
- k. Melakukan pemungutan retribusi pengawasan menara telekomunikasi;
- l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Informasi Publik

Dalam menjalankan tupoksinya, Kepala Bidang Informasi Publik dibantu oleh Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik, Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik.

2.1. Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik

Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pelaksanaan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi publik serta penyediaan konten lintas sektoral;
- d. Melaksanakan peliputan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. Menyelenggarakan monitoring dan pengolahan isu publik dan pengaduan masyarakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan radio milik Pemerintah Kabupaten;

- g. Melaksanakan layanan siaran keliling;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan peliputan, pengelolaan opini dan aspirasi serta penyediaan konten lintas sektoral;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik.

2.2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyelenggarakan layanan permohonan informasi dan dokumentasi serta sengketa informasi;
- e. Menyelenggarakan pembinaan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik.

2.3. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik

Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan dan kemitraan media massa;

- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan dalam hal pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- d. Menyelenggarakan pembinaan media massa dan sosialisasi ketentuan tentang pers;
- e. Menyelenggarakan bimbingan teknis/pelatihan jurnalistik;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan media massa;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan dan kemitraan media massa;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Informasi Publik;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Informasi Publik.

3. Bidang Aplikasi Informatika

Dalam menjalankan tupoksinya, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika, Seksi Pemberdayaan Informatika serta Seksi Layanan Data dan Statistik.

3.1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika

Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- d. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- e. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan layanan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan layanan keamanan informasi system elektronik pemerintah;

- i. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengembangan informatika;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

3.2. Seksi Pemberdayaan Informatika

Seksi Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan Pemberdayaan Informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kemitraan informatika masyarakat;
- e. Menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* implementasi teknologi informasi dan komunikasi di Pemerintah Kabupaten;
- f. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. Melaksanakan analisis dan kajian implementasi teknologi informasi dan komunikasi pemerintah;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Informatika;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Aplikasi Informatika.

3.3. Seksi Layanan Data dan Statistik

Seksi Layanan Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;

- d. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data;
- e. Melaksanakan perekaman, updating dan pengamanan data statistik sektor komunikasi dan informatika;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/kembaga terkait guna mendapatkan dan menyiapkan bahan sajian untuk media informasi;
- g. Emantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan layanan data dan statistik sektor komunikasi dan informatika;
- h. Memberikan saran dan oertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

4. Bidang Komunikasi Publik Dan Persandian

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian dibantu oleh Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, Seksi Pengelolaan Media Publik serta Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan persandian;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kenijakan teknis pelaksanaan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja dalam hal penyelenggaraan penguataan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- d. Menyelenggarakan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- e. Melaksanakan diseminasi informasi dan kemitraan dengan lembaga komunikasi sosial;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan kemitraan lembaga komunikasi sosial dan pelaksanaan diseminasi informasi;
- g. Pengawasan menara telekomunikasi;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan persandian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

4.2. Seksi Pengelolaan Media Publik

Seksi Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan media telekomunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan media center, media luar ruang, media cetak dan media sosial milik Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan kemitraan dengan pengelola mmedia komunikasi publik local;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta penyediaan konten lintas sektoral;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

4.3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- b. Menyusun rencana dan program kerja penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- d. Melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan informasi berklarifikasi di tingkat Daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan pusat data persandian;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga Sandi Negara;
- g. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Persandian.

5. UPT LPSE

UPT LPSE menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

B A B III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain :

1. Belum optimalnya kelembagaan dan peran PPID Kabupaten beserta PPID pembantu
2. Belum terbentuknya Badan Hukum Radio Suara Lumajang sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
3. Belum optimalnya pengelolaan kemitraan dengan media massa
4. Belum optimalnya kelembagaan dan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah terbentuk
5. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang yang tidak terjangkau sinyal komunikasi sehingga ada kesenjangan dalam akses informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan
6. Belum adanya masterplan tata kelola pengembangan TIK Kabupaten Lumajang
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang terintegrasi sampai dengan tingkat desa
8. Sistem informasi manajemen berbasis elektronik masih dijalankan per sektor belum terintegrasi dengan sektor lainnya
9. Kurangnya SDM yang bisa menggunakan sarana dan prasarana TIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis elektronik yang ada

3.2. Telaah Visi, Misi dan Progran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

A. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Lumajang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis, senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Secara filosofis visi tersebut mengandung makna yaitu:

Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang;

Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;

Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- b. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
- c. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tidak bisa mengabaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Permasalahan yang berkembang serta dari gambaran pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sasaran pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan isu-isu strategis dalam menyusun dan mengambil kebijakan. Ada beberapa isu strategis yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra yakni sebagai berikut :

DINAMIKA INTERNASIONAL	DINAMIKA NASIONAL	DINAMIKA REGIONAL
Globalisasi arus informasi	Diberlakukannya penggunaan Tower/menara bersama oleh operator seluler	<ul style="list-style-type: none"> • Website SKPD/Instansi pemerintah harus menggunakan alamat go.id • Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam berbagai hal • Sebagian masyarakat yang tidak/belum memanfaatkan internet dapat memakai media informasi dan komunikasi konvensional, seperti KIM, Dialog dan komunitas kesenian • Dengan semakin majunya TIK belum diimbangi dengan SDM yang berkembang di masyarakat • Sarana dan prasarana yang belum memadai baik segi jumlah maupun teknologinya • Penyebarluasan informasi melalui TIK namun masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung

B A B IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi”

4.2. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

a) Meningkatkan Saluran Komunikasi dan Informasi

Indikator sasaran “Meningkatnya Saluran Komunikasi dan Informasi” adalah peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi yang dihitung dengan formula jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun.

Jumlah saluran komunikasi dan informasi merupakan penjumlahan dari jumlah media massa yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah media elektronik (radio), jumlah media cetak (buletin/majalah), jumlah Kelompok Informasi Masyarakat, Jumlah PPID (PPID Pembantu dan PPID Desa/Kelurahan), Jumlah Media Online (website dan media sosial) dan jumlah media luar ruang (baliho/spanduk/videotron).

b) Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK

Indikator sasaran “Meningkatnya Pelayanan Komunikasi dan Informasi Berbasis TIK” adalah peningkatan Peningkatan jumlah web aplikasi atau sub domain yang dihitung dengan formula jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Analisis Lingkungan Strategis

Faktor Eksternal	OPORTUNISTIES (O)	THREATS (T)
Faktor Internal	1 Semakin maju dan berkembangnya TIK 2 Adanya berbagai ragam media informasi 3 Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 4 Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat	1 Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat 2 Lemahnya jaringan informasi 3 Kurang sadar informasi 4 Adaptasi perkembangan TIK lambat

STRENGTH (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T
1. Adanya Sumber Daya antara lain SDM, Saranan dan Prasarana	1. Dengan adanya SDM, Sarana dan prasarana dapat memanfaatkan kemajuan TIK	1. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi untuk menghadapi kemajemukan dan dinamika masyarakat
2. Tersedianya anggaran	2. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta berbagai ragam media informasi	2. Adanya SDM, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
3 Adanya Perencanaan	3 Dengan tersedianya anggaran dapat mengikuti kemajuan dan perkembangan TIK	3 Tersedianya anggaran akan meningkatkan jaringan informasi
4 Adanya kelompok informasi	4 Dengan adanya kelompok informasi akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat	4 Dengan adanya kelompok informasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi

WEAKNESS (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T
1 Kurangnya tenaga profesional	1 Dengan semakin majunya TIK perlu peningkatan SDM	1 Peningkatan SDM memperkuat jaringan informasi dan komunikasi
2 Prasarana dan sarana belum memadai	2 Peningkatan sarana dan prasarana untuk mengikuti perkembangan dan majunya TIK	2 Peningkatan SDM untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat
3 Anggaran belum mencukupi	3 Dalam penyebarluasan informasi dan adanya berbagai media informasi perlu adanya dukungan anggaran yang memadai	3 Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperkuat jaringan informasi dan komunikasi
4 Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada	4 Optimalisasi sarana dan prasarana informasi untuk meningkatkan kesadaran informasi bagi masyarakat	4 Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat

Dari formulasi SWOT di atas dari faktor internal maupun eksternal dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Dengan adanya kelompok informasi masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya informasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan TIK
3. Dalam penyebaran informasi perlu ditunjang adanya berbagai media informasi dan komunikasi baik yang berbasis Teknologi Informasi maupun yang Tradisional
4. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan sadar informasi di masyarakat.

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

B A B V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
 - e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa
 - a. Fasilitas Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP
 - b. Pengelolaan Radio Suara Lumajang
 - c. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - d. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
 - a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - a. Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
 - b. Pembinaan KIM
 - c. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
 - a. Penyelenggaraan persandian daerah
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a. Pengembangan Website
 - b. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
 - c. Pembangunan jaringan teknologi informasi

- d. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi
 - e. Bimbingan Teknis Pengelolaan Website
 - f. Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - g. Bimbingan Teknis Aplikasi SPSE
9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- a. Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B A B VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						
URAIAN	INDIKATOR					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan												
1	Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi	1	Penyebarluasan informasi melalui media publik		media	200	214	239	259	273	294	301
Sasaran												
1	Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	1	Jumlah saluran komunikasi dan informasi	jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun	media	200	214	239	259	273	294	301
2	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK	2	Jumlah web aplikasi/sub domain	jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun	aplikasi	2	3	8	10	14	30	50

P E N U T U P

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang adalah merupakan Program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah merupakan penjabaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Dengan disusunnya Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juni 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lumajang



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19710113 199101 1 001

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Matrik Reviu Rencana Strategis
Tahun 2015 - 2019**

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan Serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1 Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi	1 Penyebarluasan informasi melalui media publik	1.1 Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	1.1 Jumlah saluran komunikasi dan informasi	1.1.1 Meningkatkan Kinerja Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1.2 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Melalui Radio, PPID dan Kemitraan Dengan Media Massa 1.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial	1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.1.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.1.2.1 Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa 1.1.2.2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 1.1.3.1 Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
		1.2 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK	1.2 Jumlah web aplikasi subdomain	1.1.4 Optimalisasi Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 1.2.1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Publik Berbasis TIK 1.2.2 Mewujudkan ketersediaan data yang mutakhir	1.1.4.1 Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah 1.2.1.1 Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 1.2.2.1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
MATRIK RENCANA KINERJA
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Tujuan											
1	Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi	1 Penyebarluasan informasi melalui media publik	media	200	214	239	259	273	294	301	
Sasaran											
1	Meningkatnya saluran komunikasi dan informasi	1 Jumlah saluran komunikasi dan informasi	jumlah saluran komunikasi dan informasi dalam satu tahun	media	200	214	239	259	273	294	301
2	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis TIK	2 Jumlah web aplikasi/sub domain	jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola dalam satu tahun	aplikasi	2	3	8	10	14	30	50

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2015 - 2019

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) & Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
					2014		2015		2016		2017		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	1.074.121.400	40%	1.352.645.940	40%	1.487.910.534	100%	3.914.678.005	Sekretaris Dinas	Kab.Lumajang
1.1	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi dan perkantoran yang dilaksanakan	orang	0	0	0	0	0	0	0	43	1.074.121.400	43	1.352.645.940	45	1.487.910.534	45	3.914.678.005	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab.Lumajang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		0	0%	0	0%	0	0%	0	30%	1.059.048.000	30%	1.026.464.060	40%	1.091.498.000	100%	3.177.010.062	Sekretaris Dinas	Kab.Lumajang
1.2	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	%	0	0%	0	0%	0	0%	0	40%	838.487.000	30%	634.463.060	30%	705.670.900	100%	2.178.620.961	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab.Lumajang
1.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	%	0	0%	0	0%	0	0%	0	25%	220.561.000	35%	392.001.000	40%	385.827.100	100%	998.389.101	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab.Lumajang
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan		0	0%	0	0%	0	0%	0	30%	18.074.000	30%	23.832.000	40%	37.034.800	100%	78.940.947	Sekretaris Dinas	Kab.Lumajang
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan saking yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	6	1.455.000	6	1.455.000	6	1.600.500	6	4.510.518	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab.Lumajang

3.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis yang disusun	dokumen		0	0	0	0	0	0	6	1.455.000	6	904.000	6	1.600.500	6	3.959.518	Sub Bagian Keuangan	Kab.Lumajang	
3.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen		0	0	0	0	0	0	6	1.455.000	6	904.000	6	1.600.500	6	3.959.518	Sub Bagian Keuangan	Kab.Lumajang	
3.4	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan IKM	dokumen		0	0	0	0	0	0	6	1.455.000	6	684.000	6	1.600.500	6	3.739.518	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab.Lumajang	
3.5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah laporan RKA	bendel		0	0	0	0	0	0	15	12.254.000	30	19.885.000	30	30.632.800	30	62.771.875	Sub Bagian Keuangan	Kab.Lumajang	
4	Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa			619.775.000	10%	620.975.000	10%	705.495.000	15%	1.379.800.000	20%	1.352.542.000	20%	2.058.822.000	25%	2.729.393.000	100%	6.140.757.000	Bidang Informasi Publik	Kab.Lumajang
4.1	Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP	Jumlah peraturan yang dibuat	peraturan		0	0	0	0	0	0	1	52.000.000	1	0	1	100.000.000	3	152.000.000	Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik	Kab.Lumajang	
4.2	Pengelolaan Radio Suara Lumajang	Jumlah radio yang dikelola	stasiun		0	0	0	1	40.800.000	1	49.800.000	1	146.670.000	1	645.622.000	1	968.433.000	1	1.760.725.000	Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik	Kab.Lumajang
4.3	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah forum PPID yang dibentuk	PPID		0	0	0	42	44.560.000	57	30.000.000	72	66.672.000	170	266.100.000	270	399.150.000	270	731.922.000	Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kab.Lumajang
4.4	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah media massa yang kerjasama	buah		619.775.000	80	620.975.000	80	620.135.000	57	1.300.000.000	43	1.087.200.000	46	1.147.100.000	50	1.261.810.000	50	3.496.110.000	Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Media Massa	Kab.Lumajang
5	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase penyebarluasan informasi ketentuan di bidang cukai			0	0%	0	0%	0	0%	0	40%	600.000.000	30%	435.750.000	30%	479.325.000	100%	1.515.075.000	Bidang Informasi Publik	Kab.Lumajang

5.1	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan	jumlah saluran sebaran Informasi melalui media luar ruang/Media Massa/Sosialisasi	jenis	0	0	0	0	0	0	0	3	600.000.000	3	435.750.000	3	479.325.000	3	1.515.075.000	Seksi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Kab.Lumajang
6	Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan komunikasi publik		165.625.000	10%	269.225.000	10%	384.460.000	10%	279.400.000	30%	433.278.000	20%	982.829.000	20%	1.314.138.800	100%	2.730.245.800	Bidang Komunikasi Publik dan Persandian	Kab.Lumajang
6.1	Workshop SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta workshop yang aktif berpartisipasi dalam jurnalisme warga (citizen journalism)	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	200	54.380.000	400	200.000.000	400	254.380.000	Seksi Mitraan Komunikasi Publik	Kab.Lumajang	
6.2	Pembinaan KIM	Jumlah KIM yang dibentuk	KIM	165.625.000	21	165.625.000	21	127.060.000	21	95.400.000	23	166.880.000	98	494.085.000	105	592.902.000	226	1.253.867.000	Seksi Mitraan Komunikasi Publik	Kab.Lumajang
6.3	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	jumlah saluran sebaran Informasi melalui media luar ruang/Media Sosial/Media Center dan majalah	buah	0	110	103.600.000	93	257.400.000	121	184.000.000	113	266.398.000	126	434.364.000	140	521.236.800	140	1.221.998.800	Seksi Pengelolaan Media Publik	Kab.Lumajang
7	Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	jumlah penyebarluasan informasi yang bersandi		0	0%	0	0%	0	0%	0	10%	145.420.000	30%	241.100.000	50%	361.650.000	80%	748.170.000	Bidang Komunikasi Publik dan Persandian	Kab.Lumajang
7.1	Penyelenggaraan persandian daerah	jumlah informasi yang bersandi	informasi	0	0	0	0	0	0	0	40	145.420.000	50	241.100.000	80	361.650.000	80	748.170.000	Seksi Keamanan Informasi dan Persandian	Kab.Lumajang
8	Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan TIK		0	0%	0	10%	20.400.000	15%	14.400.000	25%	492.880.000	25%	595.755.000	25%	743.554.500	100%	1.832.189.500	Bidang Aplikasi Informatika	Kab.Lumajang

8.1	Pengembangan Website	jumlah kunjungan terhadap website	kunjungan	0	0	0	1000	20.400.000	1000	14.400.000	1500	106.200.000	2000	139.005.000	2500	152.905.500	2500	398.110.500	Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Kab.Lumajang
8.2	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	jumlah web aplikasi/sub domain yang dikelola	aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	10	72.000.000	31	106.340.000	50	116.974.000	50	295.314.000	Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Kab.Lumajang
8.3	Pembangunan jaringan teknologi informasi	jumlah pelayanan publik yang terintegrasi	layanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	220.560.000	4	330.840.000	4	551.400.000	Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Informatika	Kab.Lumajang
8.4	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi	pedoman tata kelola pengembangan TIK di Kabupaten Lumajang.	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	2	103.800.000	1	114.180.000	4	467.980.000	Seksi Pemberdayaan Informatika	Kab.Lumajang
8.5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Website	jumlah pengelola TIK OPD yang bisa mendistribusi informasi melalui website	orang	0	0	0	0	0	0	0	80	64.680.000	80	26.050.000	80	28.655.000	80	119.385.000	Seksi Pemberdayaan Informatika	Kab.Lumajang
8.6	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui e-procurement	paket	0	0	0	0	0	0	0	200	162.200.000	300	267.964.000	350	312.690.400	350	742.854.400	UPT LPSE	Kab.Lumajang
8.7	Bimbingan teknis aplikasi SPSE	Jumlah peserta bimtek aplikasi SPSE	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	16.300.000	40	17.930.000	80	34.230.000	UPT LPSE	Kab.Lumajang
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan data statistik daerah		0	0%	0	0%	0	0%	0	20%	182.540.000	40%	94.970.000	40%	104.467.000	100%	381.977.000	Bidang Aplikasi Informatika	Kab.Lumajang
9.1	Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah	Jumlah diseminasi informasi data statistik daerah kepada masyarakat	informasi	0	0	0	0	0	0	0	6	133.820.000	10	84.620.000	15	93.082.000	15	311.522.000	Seksi Layanan Data dan Statistik	Kab.Lumajang
9.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah data OPD yang mutakhir	OPD	0	0	0	0	0	0	0	72	48.720.000	72	10.350.000	72	11.385.000	72	70.455.000	Seksi Layanan Data dan Statistik	Kab.Lumajang
		JUMLAH		785.400.000		890.200.000		1.110.355.000		1.673.600.000		5.357.903.400		6.812.168.000		8.348.971.634		20.519.043.314	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kab.Lumajang

DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

NO	Nama	NIP	Pangkat	TMT PANGKAT	Masa Kerja Pangkat	JENIS JABATAN	ESELON	NAMA JABATAN	TMT JABATAN	STATUS JABATAN	DIKLAT SYARAT JABATAN	JENJANG	NAMA SEKOLAH	PRODI	THN LULUS	Diklat	TMT PENSIUN	SKPD
1	SUKAMTO, M.Pd	19630512 198303 1 009	IV/c	10/1/2012	24 thn 7 bln	Jabatan Struktural	III.a	SEKRETARIS	3/1/2018	Promosi	Diklat PIM Tingkat III (SPAMA/SPADYA)	S-2	UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	2003	Diklat PIM Tingkat III (SPAMA/SPADYA) - Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan LVIII Tahun 2017 10/20/2017 857 Jam Pelatihan - Pendiidkan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2017 2/9/2017 80 Jam	6/1/2021	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT
2	DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos	19710113 199101 1 001	IV/b	10/1/2015	20 thn 0 bln	Jabatan Struktural	II.b	KEPALA DINAS	5/8/2017	Promosi	Diklat Prajabatan	S-1	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	ADMINISTRASI NEGARA	1998	Diklat Prajabatan - DIKLAT KEPIMPINAN TINGKAT III 12/26/2009 360 Jam	2/1/2031	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	ALFIAN, S.Sos	19671108 198903 1 009	IV/b	4/1/2015	21 thn 1 bln	Jabatan Struktural	III.b	KEPALA BIDANG	17/7/2017	Promosi		S-1	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	ADMINISTRASI NEGARA			12/1/2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN
4	WAHYUNING INDRIASIH, S.STP.,S.IP.,M.Si.	19770907 199612 2 001	IV/a	4/1/2014	13 thn 6 bln	Jabatan Struktural	III.b	KEPALA BIDANG	2/9/2018	Mutasi	Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/SEPALA/SEPADA)	S-2	UNIVERSITAS HASANUDDIN	MAGISTER MANAJEMEN PERENCANAAN	2008	Diklat - DIKLAT PERENCANAAN PENGELOLAAN BENCANA 7/21/2017 96 Jam Bimbingan Teknis - PEMBINAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK SUMBERDAYA ALAM 4/22/2017 0 Jam Diklat - DIKLAT PENILAIAN AMDAL 3/23/2016 92 Jam Diklat - DIKLAT DASAR-DASAR AMDAL 11/28/2015 44 Jam Diklat - DIKLAT SUBSTANTIVE GREEN ECONOMY 5/2/2015 96 Jam Diklat - DIKLAT SIG DASAR 8/22/2014 82 Jam	10/1/2035	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG INFORMASI PUBLIK

															<p>Pelatihan - PELATIHAN INTELIJEN DASAR 5/18/2014 0 Jam</p> <p>Diklat - DIKLAT LOCAL ECONOMIC RESOURCE DEVELOPMENT (LERD) 10/12/2013 74 Jam</p> <p>Diklat - DIKLAT PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) 9/15/2012 96 Jam</p> <p>Workshop - WORKSHOP PENILAIAN PAK PERENCANA 10/21/2011 0 Jam</p> <p>Perencana - DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA TINGKAT MUDA 8/31/2010 304 Jam</p> <p>Bimbingan Teknis - KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 11/23/2009 0 Jam</p> <p>Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/SEPALA/SEPADA) - DIKLAT ADUM ANGKATAN II 11/22/2000 250 Jam</p>			
5	DEWI SAWITRI, S.Kom	19800813 200501 2 016	III/d	4/1/2017	12 thn 3 bln	Jabatan Struktural	III.b	KEPALA BIDANG	7/17/2017	Promosi	Diklat Prajabatan Golongan III	S-1	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA	TEKNIK INFORMATIKA	2004	<p>Diklat - DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 6/18/2016 50 Jam</p> <p>Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/SEPALA/SEPADA) - DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV 10/8/2014 0 Jam</p> <p>Diklat Prajabatan Golongan III - DIKLAT PRAJAB III 10/15/2005 0 Jam</p>	9/1/2038	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

6	BEKTI SAWIJI, S.Pd	19751117 200501 1 006	III/d	4/1/2017	12 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	2/27/2017	Promosi	Diklat Prajabatan Golongan III	S-1	UNIVERSITAS JEMBER	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	2000	Pelatihan - Pembentukan Kader PembinaBela Negara 11/15/2017 18 Jam Pelatihan - Using Educational Technology in the English Language Classroom 5/30/2017 8 Jam Seminar - Indonesia Technology Enhanced Language Learning Conference 11/4/2016 0 Jam Seminar - Bandung International Conference on Language and Education 11 7/20/2016 0 Jam Seminar - English Language Teaching and Technology 2 4/30/2016 0 Jam Pelatihan - Pelatihan untyk Pelatih tingkat Provinsi: Praktik yang Baik dalam Pembelajaran Sekolah di SMP dan MT 4/9/2016 35 Jam Diklat Prajabatan Golongan III - DIKLAT PRAJABATAN III 10/29/2005 135 Jam	12/1/2035	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN - SEKSI KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK
7	IDRUS, A.Md.	19681009 199202 1 003	III/c	10/1/2017	20 thn 8 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	2/9/2018	Mutasi	Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/ SEPALA/SEPADA)	D-III	UNIVERSITAS GADJAH MADA	D3 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	1999	Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/SEPALA/SEPADA) - Diklat PIM IV 9/18/2013 0 Jam	11/1/2026	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG INFORMASI PUBLIK - SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK
8	SUBARI	19631210 199003 1 015	III/c	10/1/2017	20 thn 0 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SUB BAGIAN	1/6/2017	Promosi		SLTA	KURSUS PEGAWAI ADMINISTRASI TINGKAT ATAS	PERKANTORAN	1992		1/1/2022	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT - SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

9	JONI HIDAYAT, SE	19740618 199403 1 005	III/c	10/1/2017	15 thn 1 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	1/1/2017	Mutasi	Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/ SEPALA/SEPADA)	S-1	STIE WIDYA GAMA LUMAJANG	MANAJEMEN PERUSAHAAN	1999		7/1/2032	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN - SEKSI PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK
10	AGUS SUSWANTO	19660814 199403 1 010	III/c	4/1/2018	19 thn 1 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	1/6/2017	Promosi	Diklat PIM Tingkat IV (ADUM/ADUMLA/ SEPALA/SEPADA)	SLTA	SMA NEGERI 1 LUMAJANG	IPA	1986		9/1/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN - SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
11	SRI HARTATIK	19691003 199803 2 006	III/c	4/1/2018	18 thn 1 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SUB BAGIAN	2/1/2017	Promosi		D-III	UNIVERSITAS JEMBER	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1992		11/1/2027	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT - SUBAG KEUANGAN
12	NIKO ADE PRASETIA, S.Kom	19800926 201001 1 007	III/c	4/1/2018	8 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	2/14/2018	Mutasi	Diklat Prajabatan Golongan III	S-1	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SERANG	TEKNIK INFORMATIKA	2015	Diklat Prajabatan Golongan III - DIKLAT PRAJAB III 216 Jam 7/6/2011	10/1/2038	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG APLIKASI INFORMATIKA - SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
13	JOKO DWI LAKSONO, S.Sos, MM	19800229 201001 1 011	III/c	4/1/2018	8 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	7/6/2017	Mutasi	Pranata Hubungan Masyarakat	S-2	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "MAHARDHIKA" SURABAYA	MAGISTER MANAJEMEN	2013	Pranata Hubungan Masyarakat - Diklat Pranata Humas 120 Jam 10/15/2016 Diklat Prajabatan Golongan III - DIKLAT PRAJAB III 216 Jam 7/6/2011	3/1/2038	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG INFORMASI PUBLIK - SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN MEDIA MASSA
14	SONY WAHYU WIRAWAN, S. I. Kom	19830210 201101 1 006	III/c	4/1/2018	7 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	1/1/2017	Promosi	Diklat Prajabatan Golongan III	S-1	UNIVERSITAS PADJADJARAN	MANAJEMEN KOMUNIKASI	2010	Pranata Hubungan Masyarakat - DIKLAT PRANATA HUMAS 120 Jam 10/15/2016 Pranata Hubungan Masyarakat - DIKLAT DASAR JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS TINGKAT AHLI 180 Jam 12/4/2014 Diklat Prajabatan Golongan III - DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 216 Jam 5/30/2012	3/1/2041	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG INFORMASI PUBLIK - SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	YULI FIRDIYANTI, A. Md	19810125 200501 2 010	III/b	4/1/2017	10 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	2/14/2018	Promosi	Diklat Prajabatan Golongan II	D-III	UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG	TEKNIK KOMPUTER	2004	Diklat Prajabatan Golongan II - Diklat Pra Jabatan 90 Jam 6/23/2005	2/1/2039	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG APLIKASI INFORMATIKA - SEKSI

																		PEMBERDAYAAN INFORMATIKA
16	EKO PURWANTO, A.Md	19810817 200501 1 011	III/b	4/1/2017	10 thn 3 bln	Jabatan Struktural	IV.a	KEPALA SEKSI	3/1/2018	Promosi		D-III	UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	MANAJEMEN INFORMATIKA	2004		9/1/2039	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG APLIKASI INFORMATIKA - SEKSI LAYANAN DATA DAN STATISTIK
17	SURTIYATI INSIYAH	19681023 199003 2 004	III/b	4/1/2010	15 thn 1 bln	Jabatan Pelaksana		Pengelola Keuangan	1/2/2018			SLTA	SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS SWASTA PGRI I LUMAJANG	BIOLOGI	1988		11/1/2026	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT - SUBAG KEUANGAN
18	KARSO	19660925 199403 1 009	II/d	4/1/2018	21 thn 1 bln	Jabatan Pelaksana			--			SLTA	KELOMPOK BELAJAR PAKET C ARIMBATMAJA	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	2003		10/1/2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PERSANDIAN - SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN
19	SUGENG GUNAWAN	19810212 201406 1 003	II/b	10/1/2018	14 thn 1 bln	Jabatan Pelaksana		Bendahara	12/29/2017			SLTA	SMU PGRI 1 LUMAJANG	IPS	2000		3/1/2039	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - SEKRETARIAT - SUBAG KEUANGAN
20	SUMARI	19680820 200701 1 020	II/a	10/1/2018	16 thn 10 bln	Jabatan Pelaksana		Pengelola Keuangan	1/2/2018			SLTP	SWASTA PGRI	-	1985		9/1/2026	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - BIDANG INFORMASI PUBLIK - SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Lumajang, 24 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19710113 199101 1 001

**DATA NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	POSISI PEKERJAAN	IJASAH	MASA KERJA	BIDANG
1	KURNIAWAN ARI NUGROHO	Pengadministrasi Umum	SMA	Tahun 11 bulan	Sekretariat
2	RIZKA HARTAMI PUTRI, S. Pd	Pengelola Kepegawaian	S1	Tahun 11 bulan	Sekretariat
3	ANGGRAENI HANAWITA, SE	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	S1	1 Tahun 4 bulan	Sekretariat
4	MUCHAMAD MASHUDI	Pengadministrasi sarana dan prasarana	SMA	2 Tahun 1 bulan	Sekretariat
5	ACHMAD HERI SUSANTO	Pengemudi	SMP	10 tahun	Sekretariat
6	AINUL YAKIN	Pengadministrasi Keuangan	SMA	10 Tahun 11 bulan	Sekretariat
7	TAOFIK HIDAYAT	Pengadministrasi Keuangan	SMA	2 Tahun	Sekretariat
8	DIDI PRAMUJIANTO, SE	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	S1	11 bulan	Sekretariat
9	SILVY NIHAYAH, S. AP	Pengolah Data Laporan Keuangan	S1	2 Tahun	Sekretariat
10	HERMANSAH	Pramu Kebersihan	SMP	1 Tahun 8 bulan	Sekretariat
11	CIKO ALI MUSTOFA	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	12 Tahun 9 bulan	Komunikasi Publik
12	MAULANA JIMMY KURNIAWAN	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	1 Tahun 8 bulan	Komunikasi Publik
13	M.KHOIRUL ANAM	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	S1	3 Tahun 9 bulan	Komunikasi Publik
14	AGNES CANTIKA DWI S., S.I.Kom	Pengadministrasi Umum	S1	1 Tahun 7 bulan	Komunikasi Publik
15	GALIH WIDHI K., S. Si, M. AP	Pengolah Data Informasi	S1	1 Tahun 1 bulan	Komunikasi Publik
16	ACHMAD WAHYUDI	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	Tahun 8 bulan	Komunikasi Publik
17	MUHAMMAD DICKY AP	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	Tahun 8 bulan	Komunikasi Publik
18	AHMAD FERDIANSYAH	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	Tahun 8 bulan	Komunikasi Publik
19	IMAM ARIEF BUSTOMI	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	1 Tahun 8 bulan	Info Publik
20	EDI JUNAEDI	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi	SMA	3 Tahun 9 bulan	Info Publik
21	RIZKI SURYA AMELIA	Penyiar Radio	S1	7 Tahun 9 bulan	Info Publik
22	BOBBY WIDJAYANTO, S.I.Kom	Tenaga Peliputan	S1	1 Tahun 8 bulan	Info Publik
23	LAILI AJENG PRAWESTRI	Penyiar Radio	S1	1 Tahun 7 bulan	Info Publik
24	AHMAD ZAKARIA	Penjaga Radio	SMP	Tahun 8 bulan	Info Publik
25	YONGKY DWI CAHYADI	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	1 Tahun 8 bulan	Info Publik
26	MEILANIZA FAZZIRA	Pengelola Pengaduan Publik	D3	1 Tahun 8 bulan	Info Publik
27	ARIESTA YUGA LAVITASARI	Juru Informasi dan Komunikasi	SMA	Tahun 11 bulan	Info Publik
28	AGUS HARIYANTO, S.Pd	Tenaga Peliputan	S1	14 hari	Info Publik
29	WIDYA DWI RESTANTI, S.ST	Pengadministrasi Umum	S1	1 Tahun 8 bulan	Info Publik
30	EMILDA DWI PRATIWI	Pengadministrasi Umum	S1	1 Tahun 1 bulan	Info Publik
31	M. FENDI KURNIAWAN, S. T	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	S1	1 Tahun 8 bulan	Aptika
32	KADIMAS YUSUFATHUR RAHMAN	Teknisi Produksi Multimedia dan Web	SMA	1 Tahun 8 bulan	Aptika
33	YOPI WAHYU PURWANTO, S. Kom	Analisis Sistem Informasi	S1	1 Tahun 8 bulan	Aptika
34	NURUS SALMAH, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	S1	1 Tahun 8 bulan	Aptika
35	PRICILIAN INDAH MUSTIKA, S.Si	Analisis Statistik	S1	1 Tahun 7 bulan	Aptika
36	SAHRA DEVI OKTAVIA	Pengelola LPSE	D3	Tahun 11 bulan	LPSE
37	TEGUH HADI PRASETYO	Teknisi Jaringan Instalasi	D1	Tahun 11 bulan	LPSE
38	LUBIS ZULKARNAIN	Pengelola LPSE	S1	5 Tahun 9 bulan	LPSE
39	ACHMAD MAULANA MALIK	Tenaga Pengadministrasi LPSE	S1	Tahun 5 bulan	LPSE

Lumajang, 31 Desember 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



DONY FIMBRIYANTO YANTRI, S.Sos

NIP. 19710113 199101 1 001